

RENCANA STRATEGIS 2021 - 2026



**DINAS KETAHANAN PANGAN,
PERTANIAN DAN PERIKANAN**

KABUPATEN BALANGAN

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke Hadirat ALLAH SWT, yang telah memberikan rahmat, taufik dan Hidayah-Nya, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKPPP) Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 telah berhasil disusun dengan merujuk pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Renstra yang memuat Visi, Misi dan Kebijakan serta Program Pembangunan.

Renstra ini dibuat untuk mempertajam arah kebijakan, tujuan dan sasaran yang akan dicapai, khususnya dengan memuat Indikator Kinerja untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang akan menjadi acuan dan dasar dalam menyusun Perjanjian Kinerja (PK). Rencana Kerja (Renja) serta penganggaran kegiatan DPPP Kabupaten Balangan.

Akhirnya kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu pembuatan RENSTRA ini dan dengan segala kerendahan hati kami memohon saran, tanggapan dan kritik yang sifatnya membangun untuk menyempurnakan pembuatan RENSTRA ini di masa yang akan datang.

Paringin, 2021

Kepala Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan
Kabupaten Balangan



RAHMADI, S.Pt. MS
Pembina TK.1 (IV/b)
NIP. 19630908 198711 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Landasan Hukum.....	2
1.3.Maksud dan Tujuan.....	5
1.4.Sistematika Penulisan.....	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN.....	8
2.1 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi.....	8
2.2 Sumber Daya PD.....	40
2.3 Kinerja Pelayanan PD.....	48
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD.....	64
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS.....	67
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.....	67
3.2 Telaahan terhadap Visi dan Misi.....	71
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga.....	73
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup.....	78
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis.....	80
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN.....	82
4.1 Tujuan dan Sasaran.....	82
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	85
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan.....	85
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	88
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	103
BAB VIII PENUTUP.....	106

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Golongan dan Esselon Jabatan.....	41
TABEL 2.2	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Per Bidang....	41
TABEL 2.3	Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan Per Bidang.....	42
TABEL 2.4	Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Yang Dimiliki Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan.....	43
Tabel T-C.23	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan.....	49
Tabel T-C.24	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan.....	59
Tabel T-B.35	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	67
Tabel T-C.25	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah....	83
Tabel T-C.26	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan.....	87
Tabel T-C.27	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan.....	94
Tabel T-C.28	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	105

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk periode lima tahun ke depan. Fungsi Renstra SKPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam pembangunan daerah. Renstra SKPD, memuat *tujuan, kebijakan, program* dan *kegiatan* pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RJPMD) yang bersifat indikatif. Dengan demikian Renstra SKPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari RPJMD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

RPJMD disusun berisi indikasi program pemerintah daerah selama lima tahun kedepan, selanjutnya diterjemahkan kedalam Rencana Strategis Kabupaten dan Rencana Strategis SKPD. Rencana Strategis SKPD sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan SKPD (Renja SKPD). Dalam tahun berjalan, pelaksanaan Renja ini akan dilakukan pengukuran kinerja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat diwujudkan oleh SKPD serta dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan sebagai salah satu SKPD di Kabupaten Balangan memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dengan tugas pokok dan fungsi menjalankan sebagian urusan pemerintahan dalam bidang pertanian kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Balangan 2021 – 2026 yaitu :

**“MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA
MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA”**

dengan misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan.
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian dan perkebunan, pariwisata dan ekonomi kreatif
3. Meningkatkan kualitas Pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan.
4. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara
5. Mewujudkan kehidupan social, budaya dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan dilandasi perundangan undangan dan peraturan sebagai berikut :

- 1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 7) Instruksi Presiden nomor 09 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengarus Utamaan Gender (PUG) dalam pembangunan;
 - 8) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114)
 - 12) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3)
 - 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DKPPP TAHUN 2021 – 2026

- Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015.
 - 15) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Balangan; (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan No.02 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah No.43 Tahun 2008
 - 16) Peraturan Daerah kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;(Lembaran Daerah Kabupaten Balangan No.03 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah No.02 Tahun 2008;
 - 17) Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan No. 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan;
 - 18) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - 19) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
 - 20) Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
 - 21) Peraturan Bupati Balangan Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Balangan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 adalah penyediaan dokumen perencanaan pembangunan yang berisi :

1. Penjabaran Visi dan Misi Bupati/Wakil Bupati Balangan Tahun 2021-2026 ke dalam program prioritas pembangunan daerah berdasarkan melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan periode lima tahun ke depan.
2. Penjabaran program prioritas Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yang dalam penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan.
3. Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Balangan.

Adapun tujuan penyusunannya adalah menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal, serta sebagai arah dan acuan :

- a) Menyusun Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja/Tapkin Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- b) Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LKIP);
- c) Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama lima tahun kedepan;
- d) Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
- e) Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergitas antara Sekretariat dan Bidang-Bidang pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD
- 2.2. Sumber Daya PD
- 2.3. Kinerja Pelayanan PD
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan PD

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
- 3.2. Telaahan Terhadap Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu Isu Trategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN,

- 4.1 Tujuan
- 4.2 Sasaran

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYAN DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan penjelasan dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Kepala Daerah dibantu oleh perangkat daerah. Secara umum perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam lembaga sekretariat. Unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam bentuk lembaga teknis daerah, sedangkan unsur pelaksana daerah diwadahi dalam bentuk dinas daerah.

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan adalah Dinas Daerah yang merupakan unsur pelaksana urusan bidang pertanian Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati sebagai Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Balangan Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

a. Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi

1. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor : 86 tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan

Pemerintahan dibidang penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan, penanganan kerawanan pangan, keamanan pangan, sarana pertanian, prasarana pertanian, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, pengendalian, penanggulangan bencana pertanian, perikanan tangkap dan perikanan budidaya serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan dibidang penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan, penanganan kerawanan pangan, keamanan pangan, sarana pertanian, prasarana pertanian, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, pengendalian, penanggulangan bencana pertanian, perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
- b. pelaksanaan kebijakan dibidang penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan, penanganan kerawanan pangan, keamanan pangan, sarana pertanian, prasarana pertanian, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, pengendalian, penanggulangan bencana pertanian, perikanan tangkap dan perikanan budidaya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian, penyelenggaraan ketahanan pangan, penanganan kerawanan pangan, keamanan pangan, sarana pertanian, prasarana pertanian, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner, pengendalian, penanggulangan bencana pertanian, perikanan tangkap dan perikanan budidaya
- d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Fungsi

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan menyelenggarakan Fungsi :

- a. Perumusan Kebijakan Dibidang Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan;
- b. Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan;
- c. Pelaksanaan Evaluasi Dan Pelaporan Dibidang Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan;
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas; Dan
- e. Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Bupati.

a. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan didukung dengan unsur-unsur organisasi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Balangan nomor 88 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan. Unsur-unsur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan terdiri dari :

- a. Sekretariat
- b. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura
- c. Bidang Peternakan
- d. Bidang Perikanan
- e. Bidang Perkebunan
- f. Bidang Ketahanan Pangan
- g. Bidang Penyediaan, Pengembangan Prasarana dan Penyuluhan Pertanian

h. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

i. Kelompok Jabatan Fungsional

❖ Tugas Pokok dan Uraian Tugas

(1) Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan, membina dan mengendalikan penyusunan rencana dan program, pengelolaan keuangan dan menyelenggarakan urusan umum, aset dan administrasi kepegawaian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan program dan rencana kegiatan Dinas;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan Dinas;
- d. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan surat-menyurat dan rumah tangga lingkup Dinas;
- e. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan organisasi, tatalaksana dan hubungan masyarakat lingkup Dinas;
- f. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan aset daerah lingkup Dinas; dan
- g. penyusunan program, koordinasi, pembinaan dan pengendalian pengelolaan administrasi kepegawaian lingkup Dinas.

Sekretariat terdiri dari :

- I. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- II. Sub Bagian Keuangan
- III. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- I. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan, evaluasi, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan, dan penyusunan rencana anggaran.

Uraian tugas adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kegiatan;
 - b. Menghimpun, mengolah, menganalisis dan menyajikan sesuai kebutuhan;
 - c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana strategis;
 - d. Menyiapkan bahan dan mengevaluasi kegiatan program dan rencana kegiatan;
 - e. Menyiapkan bahan dan menyusun sistem informasi sesuai kebutuhan;
 - f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja;
 - g. Menyiapkan bahan dan menyusun bahan Laporan Pertanggungjawaban dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban;
 - h. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyusunan program; dan
 - i. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- II. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan dan pelaporan keuangan.

Uraian tugas adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan keuangan;
- b. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan keuangan;
- c. menyiapkan bahan dan melaksanakan kerjasama penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
- d. menyiapkan bahan dan mengelola penatausahaan dan akuntansi keuangan;

- e. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja dan pertanggung jawaban keuangan;
- f. menyiapkan bahan dan memfasilitasi pemeriksaan internal maupun eksternal serta tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

III. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengelola surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi, ketatalaksanaan, pengelolaan aset dan administrasi kepegawaian.

Uraian tugas adalah sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta administrasi kepegawaian;
- b. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan surat-menyurat, ekspedisi dan kearsipan, urusan rumah tangga, pengelolaan aset, hubungan masyarakat dan keprotokolan, organisasi dan ketatalaksanaan serta kepegawaian;
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan surat-surat dan ekspedisi;
- d. Menyiapkan bahan, mengelola arsip dan menyusun jadwal retensi serta penghapusan arsip;
- e. Menyiapkan bahan, mengelola fasilitas kerumahtanggaan, mengendalikan ketertiban dan keamanan lingkungan kantor;
- f. Menyiapkan bahan, dan melaksanakan analisis kebutuhan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU) dan Rencana Tahunan Barang Unit (RTBU);
- g. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan aset;
- h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan laporan penatausahaan aset;

- i. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan pengelolaan aset;
 - j. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
 - k. Menyiapkan bahan analisa dan evaluasi efektivitas organisasi dan ketatalaksanaan;
 - l. Menyiapkan bahan dan memproses administrasi pembayaran gaji dan tunjangan;
 - m. Menyiapkan bahan dan menyusun daftar nominatif dan daftar urutan kepangkatan pegawai;
 - n. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi penilaian kinerja pegawai;
 - o. Menyiapkan bahan dan memproses administrasi mutasi kepegawaian;
 - p. Menyiapkan bahan dan mengelola dokumen dan data kepegawaian;
 - q. Menyiapkan bahan dan mengelola informasi kepegawaian;
 - r. Menyiapkan bahan pembinaan pegawai; dan
 - s. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (2) Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan tanaman pangan, perbenihan dan perlindungan tanaman pangan dan Hortikultura serta pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan Hortikultura.
- Untuk melaksanakan tugas Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian tanaman pangan dan Hortikultura;
 - b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian perbenihan dan perlindungan tanaman pangan dan Hortikultura; dan
 - c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan Hortikultura;

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Terdiri dari :

- I. Seksi Tanaman Pangan
- II. Seksi Hortikultura
- III. Seksi Perlindungan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura

- I. Seksi Tanaman Pangan melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi Kegiatan Tanaman Pangan

Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan tanaman pangan;
 - b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data tanaman pangan;
 - c. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis tanaman pangan;
 - d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi tanaman pangan;
 - e. Melaksanakan Bimbingan Teknis peningkatan produksi, produktifitas, serta penerapan teknologi budidaya tanaman pangan;
 - f. Menyiapkan fasilitasi untuk peningkatan produksi tanaman pangan;
 - g. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan tanaman pangan;
 - h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi tanaman pangan;
 - i. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja tanaman pangan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- II. Seksi Hortikultura melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi Kegiatan Hortikultura
- Uraian tugas sebagaimana dimaksud sebagai berikut :
- a. Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan hortikultura;
 - b. Mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data hortikultura;

- c. Menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis hortikultura;
- d. Menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi hortikultura;
- e. Melaksanakan Bimbingan Teknis peningkatan produksi, produktifitas, serta penerapan teknologi budidaya hortikultura;
- f. Menyiapkan fasilitasi untuk peningkatan produksi hortikultura;
- g. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan hortikultura;
- h. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi hortikultura;
- i. Menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja hortikultura; dan
- j. Melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.hortikultura;

III. Seksi Perlindungan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan.

Uraian tugas adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan perlindungan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data perlindungan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis perlindungan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi perlindungan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- e. mengendalikan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- f. menangani Dampak Perubahan Iklim (DPI) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- g. melaksanakan pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- h. melaksanakan penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis;

- i. melaksanakan penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan;
 - j. melaksanakan penyusunan standar pelayanan publik pemberian izin usaha pertanian;
 - k. melaksanakan penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha pertanian;
 - l. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian.
 - m. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan perlindungan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;
 - n. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi perlindungan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;
 - o. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja perlindungan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura; dan
 - p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (3) Bidang Peternakan mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Peternakan, Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner serta Usaha Produksi dan Pengolahan Hasil Peternakan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Peternakan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian Penyediaan dan Pengembangan Sarana Peternakan;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian Usaha Produksi dan Pengolahan Hasil Peternakan; dan
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun kebijakan teknis Penyediaan dan Pengembangan Sarana Peternakan, Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner serta pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan Penyediaan dan Pengembangan Sarana Peternakan;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan Mengendalikan Usaha Produksi dan Pengolahan Hasil Peternakan;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
- e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bidang Peternakan terdiri dari :

- I. Seksi Penyediaan dan Pengembangan Sarana Peternakan ;
- II. Seksi Usaha Produksi dan Pengolahan Hasil Peternakan; dan
- III. Seksi Pengendalian Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

- I. Seksi Penyediaan dan Pengembangan Sarana Peternakan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi Penyediaan dan Pengembangan Sarana Peternakan.

Uraian tugas adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyediaan dan pengembangan sarana peternakan;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data penyediaan dan pengembangan sarana peternakan;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyediaan dan pengembangan sarana peternakan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi penyediaan dan pengembangan sarana peternakan;

- e. melaksanakan pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian (peternakan) sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi;
 - f. melaksanakan pendampingan penggunaan sarana pendukung peternakan;;
 - g. melaksanakan peningkatan kualitas Sumber Daya Genetik (SDG) hewan/tanaman;
 - h. melaksanakan pemanfaatan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan/tanaman;
 - j. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan penyediaan dan pengembangan sarana peternakan;
 - i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyediaan dan pengembangan sarana peternakan;
 - j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyediaan dan pengembangan sarana peternakan; dan m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- II. Seksi Usaha Produksi dan Pengolahan Hasil Peternakan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi Usaha Produksi dan Pengolahan Hasil Peternakan.

Uraian tugas adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan usaha produksi dan pengolahan hasil peternakan;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data usaha produksi dan pengolahan hasil peternakan;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis usaha produksi dan pengolahan hasil peternakan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi usaha produksi dan pengolahan hasil peternakan;
- e. melaksanakan penilaian risiko penyakit hewan dan keamanan produk hewan;
- f. melaksanakan pengawasan atas penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran hewan dan produk hewan
- g. melaksanakan pengawasan mutu benih/bibit ternak, bahan pakan/pakan/tanaman skala kecil;

- h. melaksanakan pengawasan peredaran bahan pakan/pakan, benih/bibit hijauan pakan ternak;
 - i. menyiapkan bahan promosi hasil peternakan dan penyebarluasan informasi pasar;
 - j. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi usaha produksi pengolahan hasil peternakan;
 - k. menyiapkan bahan koordinasi dan melaksanakan kerjasama dengan unit kerja/satuan dan instansi terkait dalam pengolahan hasil peternakan;
 - l. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan usaha produksi dan pengolahan hasil peternakan;
 - m. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi usaha produksi dan pengolahan hasil peternakan;
 - n. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja usaha produksi dan pengolahan hasil peternakan; dan
 - o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- III. Seksi Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Uraian tugas adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- e. melaksanakan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis;
- f. melaksanakan pembebasan penyakit hewan menular dalam 1 (satu) daerah Kabupaten;

- (4) Bidang Perikanan mempunyai tugas mengkoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan Pemberdayaan, Pengawasan, Pengolahan, Budidaya, Pemasaran Perikanan

Untuk melaksanakan tugas Bidang Perikanan mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan Program, Koordinasi, Pembinaan, Pengaturan, Dan Pengendalian Pengolahan Dan Budidaya Tangkap;
- b. Penyusunan Program, Koordinasi, Pembinaan, Pengaturan, Dan Pengendalian Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan; dan
- c. Penyusunan Program, Koordinasi, Pembinaan, Pengaturan, Dan Pengendalian Pemberdayaan Dan Pengawasan Perikanan.

Uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun kebijakan teknis Pengolahan Dan Budidaya Tangkap, Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan dan Pemberdayaan Dan Pengawasan Perikanan;
- b. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan Pengolahan Dan Budidaya Tangkap;
- c. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- d. menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan Pemberdayaan Dan Pengawasan Perikanan; dan
- e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bidang Perikanan terdiri dari :

- I. Seksi Pengelolaan Budidaya dan Tangkap;
- II. Seksi Pengolahan Pemasaran Hasil Perikanan; dan
- III. Seksi Pemberdayaan dan Pengawasan Perikanan.

- I. Seksi Pengelolaan Budidaya dan Tangkap mempunyai tugas pokok untuk melakukan kegiatan teknis pembinaan budidaya dan tangkap perikanan air

tawar termasuk didalamnya sebagai fasilitator untuk melakukan supervisi dalam pengelolaan budidaya dan perikanan tangkap.

Uraian tugas pokok tersebut adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan budidaya dan tangkap;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengelolaan budidaya dan tangkap;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan budidaya dan tangkap;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pengelolaan budidaya dan tangkap;
- e. menyediakan data dan informasi sumber daya ikan;
- f. menyediakan prasarana usaha perikanan tangkap;
- g. melaksanakan penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap;
- h. melaksanakan pengembangan kapasitas nelayan kecil;
- i. melaksanakan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil;
- j. melaksanakan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha;
- k. menetapkan prosedur pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
- l. melaksanakan pelayanan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
- m. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pengelolaan budidaya dan tangkap;
- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan budidaya dan tangkap;
- o. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan budidaya dan tangkap; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

- II. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan kegiatan teknis pembinaan termasuk didalamnya memberikan fasilitasi dan supervisi terkait pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

Uraian tugas pokok tersebut adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengolahan pemasaran hasil perikanan;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengolahan pemasaran hasil perikanan;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengolahan pemasaran hasil perikanan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pengolahan pemasaran hasil perikanan;
- e. menetapkan persyaratan dan prosedur penerbitan izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan yang usahanya, lokasi, dan/atau manfaat atau dampak negatifnya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif, serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing;
- f. melaksanakan pelayanan penerbitan izin usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan yang usahanya, lokasi, dan/atau manfaat atau dampak negatifnya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota yang menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif, serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing;
- g. mengembangkan kapasitas pembudi daya ikan kecil;
- h. melaksanakan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudi daya ikan kecil;
- i. melaksanakan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha;

- j. memberikan pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
 - k. menetapkan persyaratan dan prosedur penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota; l. melaksanakan pelayanan penerbitan Tanda Daftar Bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
 - l. menyediakan data dan informasi pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
 - m. menyediakan prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota; Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
 - n. melaksanakan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota;
 - o. melaksanakan pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat;
 - p. melaksanakan perencanaan, pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk pembudidayaan ikan di darat;
 - q. melaksanakan perencanaan, dan pengembangan pemanfaatan air untuk pembudidayaan ikan di darat;
 - r. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pengolahan pemasaran hasil perikanan;
 - s. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengolahan pemasaran hasil perikanan;
 - t. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengolahan pemasaran hasil perikanan; dan
 - u. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- III. Seksi Pemberdayaan Dan Pengawasan Perikanan mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan kegiatan teknis pemberdayaan dan pengawasan perikanan termasuk didalamnya melakukan fasilitasi dan supervisi terhadap kelestarian sumberdaya perairan.

Uraian tugas pokok tersebut adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pemberdayaan dan pengawasan perikanan;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pemberdayaan dan pengawasan perikanan;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pemberdayaan dan pengawasan perikanan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pemberdayaan dan pengawasan perikanan;
- e. menyediakan data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
- f. melaksanakan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil;
- g. meningkatkan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
- h. memberikan fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
- i. mengawasi usaha perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten;
- j. mengawasi usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten;
- k. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pemberdayaan dan pengawasan perikanan;
- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pemberdayaan dan pengawasan perikanan;
- m. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pemberdayaan dan pengawasan perikanan; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

- (5) Bidang Perkebunan mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan produksi perkebunan, perbenihan dan perlindungan perkebunan serta pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perkebunan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian produksi perkebunan;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian perbenihan dan perlindungan perkebunan; dan
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.

Uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun kebijakan teknis produksi perkebunan, perbenihan dan perlindungan perkebunan serta pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan produksi perkebunan;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan perbenihan dan perlindungan perkebunan;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan; dan
- f. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan
- g. kewenangannya.

Bidang Perkebunan terdiri dari :

- I. Seksi Produksi Perkebunan;
- II. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan; dan
- III. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan.

- I. Seksi Produksi Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi produksi perkebunan.

Uraian tugas adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan produksi perkebunan;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data produksi perkebunan;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis produksi perkebunan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi produksi perkebunan;
- e. menyiapkan bahan petunjuk teknis dan pembinaan kegiatan budidaya
- f. melaksanakan kegiatan peremajaan karet dan komoditi lainnya yang secara ekonomis tidak menguntungkan lagi;
- g. melaksanakan kegiatan perluasan areal tanaman karet dan komoditi perkebunan lainnya dalam rangka meningkatkan produksi dan pendapatan petani;
- h. melaksanakan kegiatan intensifikasi terhadap kebun-kebun karet dan komoditi perkebunan lainnya dalam upaya peningkatan produksi;
- h. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan produksi perkebunan;
- i. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi produksi perkebunan;
- j. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja produksi perkebunan; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

- II. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi perbenihan dan perlindungan perkebunan.

Uraian tugas adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan perlindungan dan perbenihan tanaman perkebunan;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data perlindungan dan perbenihan tanaman perkebunan;

- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis perlindungan dan perbenihan tanaman perkebunan;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi perlindungan dan perbenihan tanaman perkebunan;
 - e. mengendalikan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Perkebunan;
 - f. menangani Dampak Perubahan Iklim (DPI) Perkebunan;
 - g. melaksanakan pencegahan, penanganan kebakaran lahan, dan gangguan usaha perkebunan;
 - h. melaksanakan penanggulangan bencana non alam yang bersifat zoonosis;
 - i. melaksanakan penanggulangan pasca bencana alam bidang perkebunan
 - j. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan perlindungan dan perbenihan tanaman perkebunan;
 - k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi perlindungan dan perbenihan tanaman perkebunan;
 - l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja perlindungan dan perbenihan tanaman perkebunan; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- III. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan.
- Uraian tugas adalah sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
 - e. melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan kerja sama dengan satuan/unit kerja dan instansi terkait;

- f. melaksanakan pembinaan bagi kelompok tani pekebun dan Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB) dalam hal pengolahan dan mutu hasil perkebunan;
 - g. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengolahan dan mutu hasil perkebunan;
 - h. melaksanakan fasilitasi dan supervisi pengembangan usaha, pengolahan dan mutu hasil perkebunan;
 - i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengolahan dan mutu hasil perkebunan;
 - j. menyusun petunjuk teknis dan pelaksanaan pembinaan kegiatan pengolahan dan mutu hasil perkebunan;
 - k. melaksanakan fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana perkebunan yang terkait dengan pengolahan dan mutu hasil perkebunan;
 - l. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
 - m. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
 - n. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan; dan
 - o. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (6) Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan, Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat Dan Penanganan Kerawanan Dan Pengawasan Keamanan Pangan.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pengelolaan sumber daya ekonomi kedaulatan dan kemandirian pangan;

- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat; dan
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penanganan kerawanan dan pengawasan keamanan

Uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan, Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat Dan Penanganan Kerawanan Dan Pengawasan Keamanan Pangan;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan Mengendalikan Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat Dan Penanganan Kerawanan; dan
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, dan mengendalikan Pengawasan Keamanan Pangan; dan
- e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bidang Ketahanan pangan terdiri dari :

- I. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Kedaulatan dan Kemandirian Pangan;
 - II. Seksi Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat; dan
 - III. Seksi Penanganan Kerawanan dan Pengawasan Keamanan Pangan.
-
- I. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan.

Uraian tugas adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pengelolaan sumber daya ekonomi kedaulatan dan kemandirian pangan;
 - b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pengelolaan sumber daya ekonomi kedaulatan dan kemandirian pangan;
 - c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengelolaan sumber daya ekonomi kedaulatan dan kemandirian pangan;
 - d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pengelolaan sumber daya ekonomi kedaulatan dan kemandirian pangan;
 - e. menyediakan infrastruktur lumbung pangan;
 - f. menyediakan infrastruktur lantai jemur;
 - g. menyediakan infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya;
 - h. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penyediaan infrastruktur logistik;
 - i. menyusun rencana dan peta jalan kebutuhan infrastruktur pendukung kemandirian pangan;
 - j. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pengelolaan sumber daya ekonomi kedaulatan dan kemandirian pangan;
 - k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pengelolaan sumber daya ekonomi kedaulatan dan kemandirian pangan;
 - l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pengelolaan sumber daya ekonomi kedaulatan dan kemandirian pangan; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- II. Seksi Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat Dan Penanganan Kerawanan.

Uraian tugas adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat;

- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat;
- e. menyediakan informasi harga pangan dan neraca bahan makanan;
- f. menyediakan pangan berbasis sumber daya lokal;
- g. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan distribusi pangan pokok dan pangan lainnya;
- h. melaksanakan pemantauan stok, pasokan dan harga pangan;
- i. melaksanakan pengembangan kelembagaan dan jaringan distribusi pangan;
- j. melaksanakan pengembangan kelembagaan usaha pangan masyarakat dan toko tani Indonesia;
- k. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian cadangan pangan kabupaten;
- l. menyusun rencana kebutuhan pangan lokal; m. melaksanakan pengadaan cadangan pangan pemerintah kabupaten;
- m. melaksanakan pemeliharaan cadangan pangan pemerintah kabupaten;
- n. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penentuan harga minimum pangan pokok lokal;
- o. melaksanakan penyusunan dan penetapan target konsumsi pangan per kapita per tahun;
- p. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- q. koordinasi dan sinkronisasi pemantauan dan evaluasi konsumsi per kapita per tahun;
- r. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat;
- s. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat;
- t. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat; dan
- u. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

III Seksi Penanganan Kerawanan dan Pengawasan Keamanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi Pengawasan Keamanan Pangan.

Uraian tugas adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penanganan kerawanan dan pengawasan keamanan pangan;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data penanganan kerawanan dan pengawasan keamanan pangan;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penanganan kerawanan dan pengawasan keamanan pangan;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi penanganan kerawanan dan pengawasan keamanan pangan;
- e. melaksanakan penyusunan, pemutakhiran dan analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan;
- f. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten;
- g. melaksanakan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
- h. melaksanakan penguatan kelembagaan keamanan pangan segar daerah kabupaten;
- i. melaksanakan sertifikasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten;
- j. melaksanakan registrasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten;
- k. memberikan rekomendasi keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten;
- l. menyediakan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten;
- m. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan penanganan kerawanan dan pengawasan keamanan pangan;

- n. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi penanganan kerawanan dan pengawasan keamanan pangan;
- o. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penanganan kerawanan dan pengawasan keamanan pangan;
- p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

(7) Bidang Penyediaan, Pengembangan Prasarana dan Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas mengoordinasikan, membina, mengatur serta mengendalikan prasarana, sarana dan pengelolaan lahan pertanian, pembangunan prasarana pertanian, penyuluhan pertanian.

Untuk melaksanakan Bidang Penyediaan, Pengembangan Prasarana dan Penyuluhan Pertanian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian prasarana, sarana dan pengelolaan lahan pertanian;
- b. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian pembangunan prasarana pertanian; dan
- c. penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, dan pengendalian penyuluhan pertanian.

Uraian tugas Bidang Penyediaan, Pengembangan Prasarana dan Penyuluhan Pertanian sebagai berikut:

- a. menyusun kebijakan teknis prasarana, sarana dan pengelolaan lahan pertanian, pembangunan prasarana pertanian, penyuluhan pertanian;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan prasarana, sarana dan pengelolaan lahan pertanian;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan pembangunan prasarana pertanian;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur dan mengendalikan penyuluhan pertanian; dan
- e. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bidang Penyediaan, Pengembangan Prasarana dan Penyuluhan Pertanian terdiri dari :

- I. Seksi Prasarana, Sarana dan Pengelolaan Lahan Pertanian;
 - II. Seksi Pembangunan Prasarana Pertanian; dan
 - III. Seksi Penyuluhan Pertanian.
-
- I. Seksi Prasarana, Sarana dan Pengelolaan Lahan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi prasarana, sarana dan pengelolaan lahan pertanian.

Uraian tugas adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan prasarana, sarana dan pengelolaan lahan pertanian;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data prasarana, sarana dan pengelolaan lahan pertanian;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis prasarana, sarana dan pengelolaan lahan pertanian;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi prasarana, sarana dan pengelolaan lahan pertanian;
- e. melaksanakan pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B;
- f. menyusun Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B;
- g. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya;
- h. menyusun masterplan pengembangan prasarana, sarana, kawasan dan komoditas perkebunan;
- i. melaksanakan pelestarian dan pemanfaatan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak;
- j. melaksanakan pengawasan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak;
- k. melaksanakan identifikasi dan penetapan lahan penggembalaan umum;
- l. melaksanakan pengelolaan lahan penggembalaan umum;

- m. melaksanakan pembinaan dan pengawasan lahan penggembalaan umum;
 - n. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan prasarana, sarana dan pengelolaan lahan pertanian;
 - o. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi prasarana, sarana dan pengelolaan lahan pertanian;
 - p. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja prasarana, sarana dan pengelolaan lahan pertanian; dan
 - q. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- II. Seksi Pembangunan Prasarana Pertanian mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi pembangunan prasarana pertanian.

Uraian tugas adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan pembangunan prasarana pertanian;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data pembangunan prasarana pertanian;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pembangunan prasarana pertanian;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi pembangunan prasarana pertanian;
- e. melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani;
- f. melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan embung pertanian;
- g. melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- h. melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan DAM parit;
- i. melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan long storage;
- j. melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan pintu air;
- k. melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan rumah potong hewan;

- l. melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan balai penyuluh di kecamatan serta sarana pendukungnya;
 - m. melaksanakan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya;
 - n. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan pembangunan prasarana pertanian;
 - o. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembangunan prasarana pertanian;
 - p. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja pembangunan prasarana pertanian; dan
 - q. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- III. Seksi Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan dan memberikan fasilitasi dan supervisi penyuluhan pertanian.

Uraian tugas adalah sebagai berikut :

- a. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan penyuluhan pertanian;
- b. mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data penyuluhan pertanian;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis penyuluhan pertanian;
- d. menyiapkan bahan dan melaksanakan fasilitasi dan supervisi penyuluhan pertanian;
- e. meningkatkan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa;
- f. melaksanakan pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa;
- g. melaksanakan penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian;
- h. melaksanakan pembentukan badan usaha milik petani;
- i. melaksanakan pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani tingkat kabupaten;

- j. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan urusan penyuluhan pertanian;
 - k. menyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyuluhan pertanian;
 - l. menyiapkan bahan dan menyusun laporan kinerja penyuluhan pertanian; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (8) UPTD dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional (kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat) dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu (kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas) pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.

UPTD mempunyai fungsi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu serta pengelolaan urusan ketatausahaan pada UPTD.

UPTD dipimpin seorang Kepala UPTD yang secara administrasi, teknis dan operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

UPTD terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok jabatan fungsional yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

- (9) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

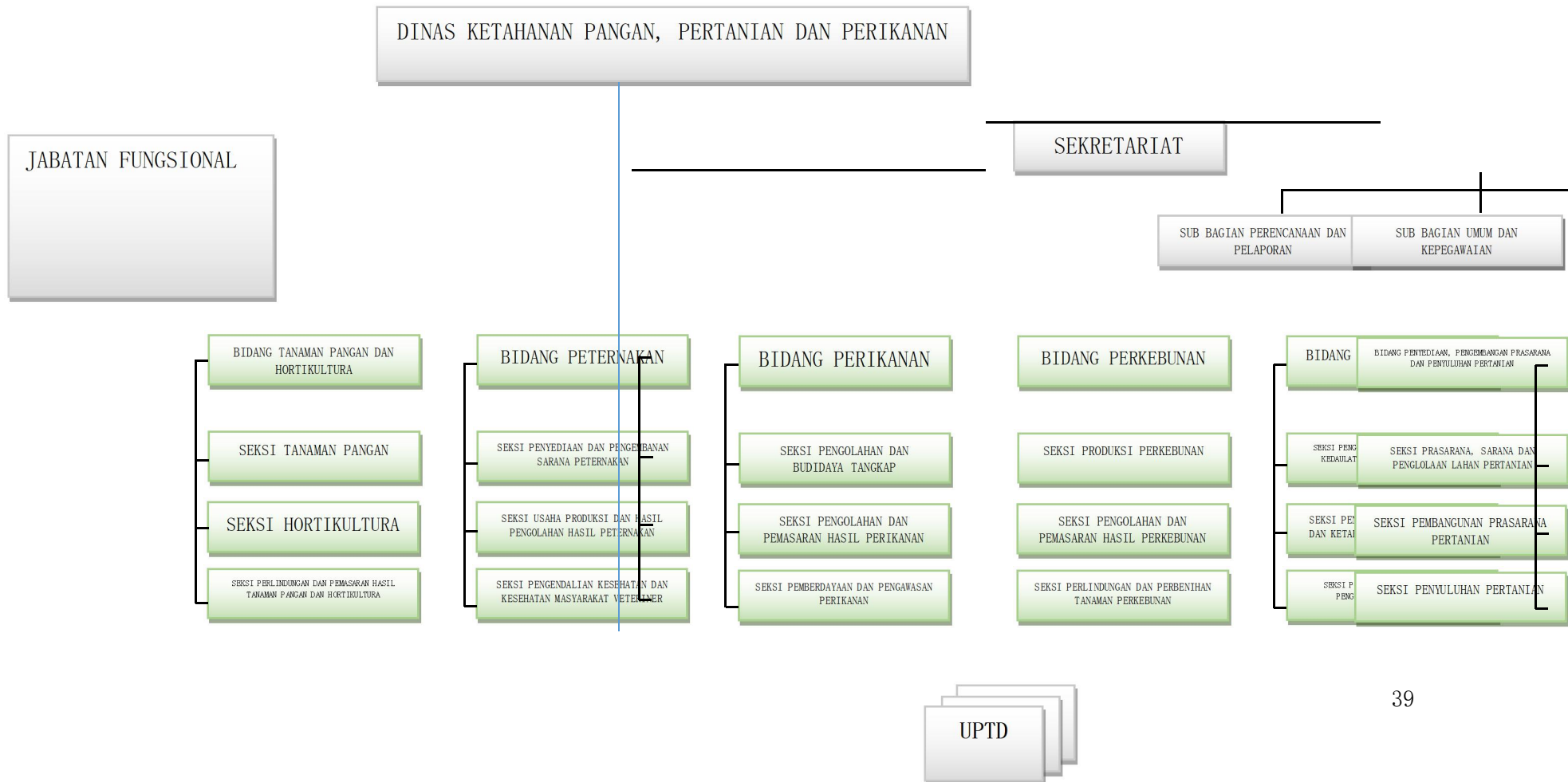
PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DKPPP TAHUN 2021 – 2026

Struktur Organisasi

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

KABUPATEN BALANGAN



2.2 Sumber Daya PD

1. Sumber Daya Manusia

Pemerintahan yang baik (good governance) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. Good governance digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan dibawa. Terkait dengan hal tersebut di atas, jumlah aparatur Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan berdasarkan data dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sampai Bulan Mei 2021 berjumlah 90 orang. Kondisi Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan dapat dilihat pada tabel 2.1.

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DKPPP TAHUN 2021 – 2026

Tabel 2.1

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan, Golongan dan Esselon Jabatan

JLH (ORG)	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	JLH (ORG)	GOL	JLH (ORG)	ESS	JLH (ORG)
90	SD	-	I/a	-	II a	1
	SLTP	4	I/b	-	III a	1
	SLTA	22	I/c	-	III b	5
	D1	-	I/d	-	IV a	14
	D2	1	II/a	4	IV b	2
	D3	9	II/b	12		
	D4	7	II/c	6		
	S1	41	II/d	4		
	S2	6	III/a	11		
	S3	-	III/b	18		
			III/c	6		
			III/d	14		
			IV/a	10		
			IV/b	5		
			IV/c	-		

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Tabel 2.2

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Per Bidang

No	Uraian	Tingkat Pendidikan							SD	Jlh
		S2	S1	D IV	D III	DII	SLTA	SLTP		
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	-	-		1
2	Sekretariat	-	4	-	-	-	2	1		7
3	Bidang Tanaman Pangan Dan Horikultura	2	8	-	1	-	-	1		12
4	Bidang Peternakan	-	3	1	2	-	-	-	2	6

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DKPPP TAHUN 2021 - 2026

5	Bidang Perikanan	2	1				2		2	7
6	Bidang Perkebunan	2	4	-	-	-	1	-		7
7	Bidang Ketahanan Pangan	2	2	1	1		4			10
8	Bidang PSP	1	2	-	-	-	1	-		4
9	UPT. Balai Benih Hamparaya	-	1	-	-	1	2	1		5
10	UPT. Puskesmas	-	1	-	3	-	2	-		6
11	UPT. BBIL Gn.Manau	-	-	-	-	-	-	-		0
12	Penyuluh Pertanian	1	15	6	3	-	15	-		40
13	Paramedik Peteriner	-	2	-	-	-	-	-		2
Jumlah		7	40	7	9	1	23	3		90

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Tabel 2.3

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan Per Bidang

No	Uraian	Tingkat Pendidikan					JFU/JFT	Jlh
		Ess II b	Ess III a	Ess III b	Ess IV a	Ess IV b		
1	Kepala Dinas	1	-	-	-	-	-	1
2	Sekretariat		1	-	2	-	4	7
3	Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura	-	-	1	3	-	4	6
4	Bidang Peternakan	-	-	1	2	-	3	6
5	Bidang Perikanan	-	-	1	3			4
6	Bidang Perkebunan	-	-	1	3	-	3	7
7	Bidang Ketahanan Pangan			1	3	-		4
8	Bidang PSP	-	-	1	1	-	2	4
9	UPT. Balai Benih Hamparaya	-	-	-	-	1	4	5
10	UPT. Puskesmas	-	-	-	-	1	5	6
11	UPT. BBIL Gunung	-	-	-	-	-	-	0

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DKPPP TAHUN 2021 – 2026

	Manau							
12	Penyuluh Pertanian	-	-	-	-	-	40	40
13	Paramedik Peteriner	-	-	-	-	-	2	2
Jumlah		1	1	5	14	2	67	90

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Kapasitas dan kapabilitas karyawan berkaitan erat dengan tingkat pendidikannya. Berdasarkan data yang ditampilkan pada Tabel 2.1. tingkat pendidikan karyawan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan yang paling banyak adalah pendidikan S1 sebanyak 41 orang, jumlah karyawan yang menamatkan pendidikan S2 tercatat sebanyak 6 orang dan paling banyak kedua yaitu SLTA sebanyak 22 orang, D IV sebanyak 7 orang, D III sebanyak 9 orang dan SLTP sebanyak 4 orang. Tingkat pendidikan bagian terbesar dari karyawan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan ini merupakan modal dasar yang penting dalam peningkatan kinerja dan menjalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan.

2. Sumber Daya Modal / Aset

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan menempati kantor yang berlantai dua beralamat di Jl. A. Yani Km 4,5 Desa Gampa Kecamatan Paringin Selatan Kabupaten Balangan. Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4

Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Yang Dimiliki Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan

No	Nama Barang	Banyaknya	Kondisi Barang	
			B	KB
1	AC Split	46	24	22

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DKPPP TAHUN 2021 - 2026

2	AC Standing	2		2
3	Alat Bedah Minor	2	2	
4	Alat Dan Mesin Klinik Perlindungan	3	3	
5	Alat Perbengkelan	1	1	
6	Alat Pertukangan	1	1	
7	Alat Tanam Jagung	1	1	
8	Alat ubin/pengukur	8	5	3
9	Alat-alat kedokteran hewan	1	1	
10	Almari Arsip	129	82	47
11	Almari Kaca	10	7	3
12	Almari Obat	2	2	
13	Almari rak data kepegawaian	2	2	
14	Almari Sound System	2	2	
15	Aluminium Foil Kemasan	1	1	
16	Baju Celana Pemadam Kebakaran	20	14	6
17	Bor Listrik	1		1
18	Brankas	1	1	
19	Cabang 21,5 inchi	1	1	
20	CCTV	2		2
21	Centrifuge	1	1	
22	Chainsaw	1	1	
23	Compare Tembak 1,5 inchi	1	1	
24	Container Dippo	15	15	
25	cooper / penggiling hasil pertanian / pemetong rumput	1	1	
26	Dispenser	11	6	5
27	Drayer	1	1	
28	Drone	2	1	1
29	DRY BOX CAMERA	1	1	
30	Engine Fire Pompa Shibaura E440C	1	1	
31	Filling Kabinet	46	28	18
32	Foot Sealer	2	2	
33	Generator Set	8	5	3
34	Gergaji Listrik	1	1	
35	Gerinda Listrik	1	1	
36	Gerobak	4		4
37	Gorden	1	1	
38	GPS	18	11	7
39	Gunting Kuku	1	1	
40	Handphone	38	38	
41	Handy Cam	2		2
42	Handy Talky (HT)	85	57	28
43	Hard disk	5		5

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DKPPP TAHUN 2021 - 2026

44	Kamera Digital	28	17	11
45	Kepala Tembak Pistol Proteciciy	1	1	
46	Keyboard	1	1	
47	Kipas Angin Gantung	1	1	
48	Kompas	4	2	2
49	Komputer/ PC	16	11	5
50	Kopling Pembagi	2	2	
51	Kulkas Obat	16	16	
52	Kursi	7	5	2
53	Kursi Tamu	4	3	1
54	Kursi Tunggu	2		2
55	Laptop	91	68	23
56	Laser Meter	1		1
57	LCD PROYEKTOR	15	3	12
58	LCD Proyektor Mini	1		1
59	Lemari Obat	1	1	
60	Lensa kamera	2		2
61	Meja Kerja	120	83	37
62	Meja Makan	1	1	
63	Meja Proyektor	2	2	
64	Meja Rapat	16	16	
65	Meja Resepsionis	1	1	
66	Mesin Absensi Sidik Jari	4	2	2
67	Mesin Cuci	1		1
68	Mesin Hitung Uang	1	1	
69	Mesin Jahit Karung	2	2	
70	Mesin Pemadam Kebakaran	6	6	
71	Mesin pemotong rumput	79	52	27
72	Mesin Pencacah Rumput	1	1	
73	Mesin Pengendalian Hama dan Penyakit	1	1	
74	Mesin Penghancur Kertas	8	3	5
75	Mesin Penyaring/ ayakan	1	1	
76	Mesin Perajang Ranting dan Dahan	1	1	
77	Mesin Perontok Padi	2	2	
78	Mesin Pompa Air	19	12	7
79	Mesin Sealer	12	12	
80	Mesin UPPO	1	1	
81	Vacum Cleaner	4	2	2
82	mikrophone	5	1	4
83	Mikroskop	3	3	
84	mist blower	3	3	
85	Mixer	1	1	
86	Mobil Dinas	9	9	

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DKPPP TAHUN 2021 - 2026

87	moester tester (pengukur kadar air benih)	4	2	2
88	Notebook	30	24	6
89	Nozel	6	6	
90	PABX/ Telepon Antar Ruangan	1		1
91	Papan Baliho	1	1	
92	Papan Data DUK	1		1
93	Papan Data SOTK	1		1
94	Penampung Rumput Portable	1	1	
95	Penampungan Air	1	1	
96	Pendeteksi Kebuntingan	3	2	1
97	Rak Buku	1	1	
98	pengambilan specimen	1	1	
99	Penyiram Tanaman	1	1	
100	PH Meter Daging	1	1	
101	Pompa Punggung	14		14
102	Post Mortem Set	1	1	
103	Power Sprayer	2	2	
104	Power Supply	3	2	1
105	Power Tresher	2	2	
106	Printer	136	92	44
107	Printer Mobile	4	1	3
108	Printer Photo	1	1	
109	Quick Truk	1	1	
110	RADIO VHF RIG	19	19	
111	Rak Besi	16	16	
112	Rak Piring	1	1	
113	Rak Pot Tempel Dinding	3	3	
114	Ranjang	3	3	
115	receiver	1	1	
116	Repeater VHF	2		2
117	Roda Untuk Generator Set	1		1
118	Running Text	1		1
119	Scaner	2		2
120	Seed Cleaner	1	1	
121	Selang Pemadam	25	25	
122	Sepeda Motor	89	74	15
123	Sepeda Motor Roda Tiga	1	1	
124	server	1	1	
125	Setelan n0 50 1 dari 4	4	4	
126	Siller Elektrik	1	1	
127	Sofa	14	12	2
128	Sound System	5	4	1
129	Sound System Portable	5	3	2

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DKPPP TAHUN 2021 - 2026

130	speaker + breaket	1	1	
131	Spuite Otomatis 1 ml	2	2	
132	Spuite Otomatis 10 ml	1	1	
133	Standar Keyboard	1	1	
134	Stang Tanam	1	1	
135	Starterkit Hidroponik 4M	2		2
136	Stik Jarum 1	4	4	
137	Stik Jarum 1.5	3	3	
138	Tabung Gas	1	1	
139	Tabung Pemadam Kebakaran	6	6	
140	Tandon Air	4	3	1
141	Tangga	1	1	
142	Telepon Fax	1		1
143	Televisi	18	13	5
144	Tempat Tidur	5	2	3
145	Teralis	1	1	
146	Tiang Bendera	1	1	
147	Timbangan Digital	1	1	
148	Timbangan Duduk	2	2	
149	Timbangan Elektrik	1	1	
150	Tongkat Ukur	1	1	
151	Traktor Mini 13hp	1	1	
152	UPS Stabilizer	7	3	4
153	USG Ternak	1	1	
154	Vacum Cairan dan Gas	1	1	
155	Wereless	2		2

Sumber : Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan

Dilihat dari tabel diatas sarana pendukung kelancaran pelaksanaan pekerjaan yang tersedia dalam jumlah dan kualitas memadai seperti kendaraan dinas maupun peralatan penunjang pekerjaan (komputer, scanner dll) dengan anggaran untuk pemeliharaan yang juga cukup memadai. Adapun barang yang sudah rusak berat sudah dilakukan usul penghapusan.

Permasalahan dalam pengelolaan barang berkaitan dengan inventarisasi asset adalah perubahan pada pemegang barang dan posisi barang yang berubah tempat tanpa sepengetahuan pengurus barang serta ketika penganggaran terjadi kesalahan dalam penempatan kode rekening, selain itu tidak adanya laporan kejelasan bantuan dari pusat/propinsi baik itu

tidak adanya laporan barang yang masuk pada pengurus barang, tidak adanya berita acara serah terima (asset) hibah dari pusat/propinsi ke daerah maupun nilai barang yang diterima sehingga pengelola barang sulit untuk mengadministrasikannya dan daerah kesulitan dalam menganggarkan biaya pemeliharaan barang tersebut.

2.3. Kinerja Pelayanan PD

Kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan yang utama berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangannya adalah Urusan Pilihan terdiri dari Urusan Ketahanan Pangan, Urusan Pertanian, dan Urusan Perikanan.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Balangan Tahun 2016 - 2021 dapat dilihat pada Tabel T-C 23 dan T-C 24.

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DKPPP TAHUN 2021 – 2026

Tabel T-C.23.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Kabupaten Balangan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK (3)	Target IKK (4)	Target Indikator Lainnya (5)	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2016 (6)	2017 (7)	2018 (8)	2019 (9)	2020 (10)	2016 (11)	2017 (12)	2018 (13)	2019 (14)	2020 (15)	2016 (16)	2017 (17)	2018 (18)	2019 (19)	2020 (20)
	Program Pelayanan administrasi perkantoran			Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Penyediaan jasa surat menyurat			Tersedianya kebutuhan akan surat menyurat (Tahun)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (Tahun)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
	Penyediaan jasa administrasi keuangan			Terbayarnya jasa administrasi keuangan (Bulan)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	100	100	100	100	100
	Penyediaan jasa kebersihan kantor			Tersedianya jasa kebersihan kantor (Tahun)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
	Penyediaan Alat Tulis Kantor			Tersedianya ATK yang memadai (Tahun)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (Tahun)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor			Tersedianya instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (Tahun)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor (Macam)	20	18	21	23	25	20	18	21	23	25	100	100	100	100	100
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			Tersedianya bahan bacaan & peraturan perundang-undangan (Macam)	5	1	1	1	1	5	1	1	1	1	100	100	100	100	100
	Penyediaan makanan dan minuman			Tersedianya makanan dan minuman kegiatan dan tamu (Tahun)	12	1	1	1	1	12	1	1	1	1	100	100	100	100	100
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah			Terkoordinasinya rapat-rapat dan konsultasi konsultasi ke luar daerah (Tahun)	155	1	1	1	1	155	1	1	1	1	100	100	100	100	100
	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam Daerah			Terkoordinasinya rapat-rapat dan konsultasi di dalam daerah (Tahun)	42	1	1	1	1	42	1	1	1	1	100	100	100	100	100
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			Cakupan sarana kerja aparatur	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Pembangunan gedung kantor			Jumlah gedung dan bangunan yang terbangun / teresab (Paket)	33	11	12	3	3	33	11	12	3	3	100	100	100	100	100
				Jumlah jalan, irigasi dan jaringan yang terbangun/teresab (Paket)	1	2	2	1	1	1	2	2	1	1	100	100	100	100	100
	Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional			Tersedianya kendaraan Roda 2 (Unit)	6	10	10	1	2	6	10	10	1	2	100	100	100	100	100
	Pengadaan Mebeleur			Tersedianya meubelur (Paket)	9	10	8	8	8	9	10	8	8	8	100	100	100	100	100
	Pengadaan Tanah			Tersedianya tanah dan bangunan untuk tempat kerja (Paket)		1					1					100			
	Pengadaan Komputer			Jumlah kelengkapan komputer dan jaringan tersedia (Paket)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
				Jumlah pc / laptop yang tersedia (Buah)	9	18	4	4	5	9	18	4	4	5	100	100	100	100	100
				Jumlah printer yang tersedia (Buah)	17	43	5	6	6	17	43	5	6	6	100	100	100	100	100
				Jumlah Peralatan Komputer Mainframe (Paket)		1					1					100			
	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor			Terpeliharanya bangunan gedung kantor (Tahun)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas / operasional			Roda 2 (Buah)	57	52	52	57	63	57	52	52	57	63	100	100	100	100	100

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DKPPP TAHUN 2021 – 2026

		Roda 4 (Buah)			11	11	12	13		11	11	12	13		100	100	100	100
	Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya perlatan & perlengkapan kantor (Tahun)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	110	121
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase tingkat Disiplin Aparatur	1	1	100	100	100	1	1	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya	Jumlah pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya Yang tersedia (Stel)	200	200	215	237	260	200	200	215	237	260	100	100	100	100	100	100
	Pengadaan Pakaian Khusus Hari - Hari Tertentu	jumlah pakaian hari - hari tertentu yang tersedia (Stel)	200	276	276	304	334	200	276	276	304	334	100	100	100	100	100	100
		Jumlah Pakaian Olahraga (Stel)		225	225	248			225	225	248			100	100	100		
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	1	1	100	100	1	1	1	100	100	100	100	100	100	100	100
	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	terlaksananya kursus - kursus singkat pelatihan / pelatihan dan bintek (Tahun)	18	1	1	1	1	18	1	1	1	1	100	100	100	100	100	100
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Persentase Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	1	1	100	100	1	1	1	100	100	100	100	100	100	100	100
	Penyusunan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yang tersusun (Laporan)	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	100	100	100	100	100	100
	Penyusunan laporan keuangan akhir tahun	Jumlah Laporan Keuangan akhir tahun yang tersusun (Jenis)	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	100	100	100	100	100	100
	Penyusunan RKA dan DPA SKPD	Jumlah RKA/RKAP dan DPA/DPPA yang tersusun (Dokumen)	4	4	4	4	5	4	4	4	4	5	100	100	100	100	100	100
	Monitoring Pengendalian dan Pembuatan Laporan Pelaksanaan Kegiatan APBD	Tersusunnya RENJA SKPD DPTPHPP dan Dilaksanakannya verifikasi dan validasi data SKPD tahun 2015 (Dokumen)																
	Penyusunan Dokumen perencanaan SKPD	Tersusunnya Dokumen Perencanaan (Dokumen)	5	4	4	4	5	5	4	4	4	5	100	100	100	100	100	100
	Program peningkatan Kesejahteraan Petani	Meningkatnya Kesejahteraan Petani	5			320	320	5			320	320	100			100	100	
	Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis	Jumlah Peserta Kegiatan/Sosialisasi/pelatihan (Orang)	320	320		320	320	320	320		320	320	100	100		100	100	
		Klinik Perlindungan TP (Unit)		3					3				100					
		Gerakan Pengendalian OPT (Orang)		200					200				100					
	Peningkatan kemampuan lembaga petani	Jumlah peserta kegiatan/ sosialisasi/pelatihan (Orang)		995					995				100					
	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Meningkatnya pemasaran hasil produksi pertanian/ Perkebunan	125			300	350	125			300	350	100			100	100	
	Promosi atas hasil produksi pertanian unggul daerah	Terlaksananya partisipasi pameran produk unggulan kab. Balangan (Paket)		5					5				100					
	Pengembangan perbenihan / pembibitan	Upaya produksi melalui penggunaan benih unggul (Orang)	100	0		7	7	100	0		7	7	100	100		100	100	
		Meningkatnya penangkaran perbenihan (Ha)	2	50		200	250	2	50		200	250	100	100		100	100	
		Jumlah gedung, bangunan yang terbangun atau terhab (Paket)	1	5		200	200	1	5		200	200	100	100		100	100	
		Jumlah jalan, irigasi dan jaringan yang terbangun/terhab (Paket)	2	2		2	3	2	2		2	3	100	100		100	100	

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DKPPP TAHUN 2021 – 2026

Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pasca Panen		Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Pengembangan Teknologi Pasca Panen (Paket)	8		8	8		8		8	8		100		100	100
		Jumlah Peserta Kegiatan/Sosialisasi/Pelatihan (Orang)	400		400	400		400		400	400		100		100	100
Pembangunan Gudang Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB)		Pembuatan Gudang Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB) (Paket)	6					6					100			
		Tersedianya Gudang Unit Penimbunan Lump (UPL) (Unit)	4					4					100			
Pengadaan Bahan Pembeku Lateks Ramah Lingkungan		Tersedianya bahan pembeku lateks ramah lingkungan (Liter)	30850					30850					100			
Pengadaan Alat Pengolahan Hasil		Tersedianya alat pengolahan hasil (Paket)	4					4					100			
Sekolah Lapang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan		Terlaksananya sekolah lapang pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan (Kelompok)	2					2					100			
Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Sistem Jaminan Mutu		Terlaksananya kegiatan bimtek penyusunan dokumen jaminan sistem mutu (Orang)	20					20					100			
Monitoring Peningkatan Mutu Hasil Perkebunan (Karet)		Terlaksananya monitoring peningkatan mutu hasil perkebunan (Kecamatan)	8					8					100			
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan		Meningkatnya Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan di Masyarakat			40400	40500				40400	40500				100	100
Penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna		Terlaksananya bantuan barang kepada masyarakat (Kecamatan)	1600	8	2000	2000	1600	8	2000	2000	100	100	100	100	100	100
Kegiatan penyuluhan penerapan teknologi perkebunan tepat guna		Jumlah Peserta Kegiatan/Sosialisasi/pelatihan (Orang)	550					550					100			
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan		Meningkatnya Produksi Pertanian/Perkebunan	170424		181800	184275	170424		181800	184275	100				100	100
Penyuluhan peningkatan produksi pertanian		Jumlah Peserta Kegiatan/Sosialisasi/pelatihan (Orang)	8308	9220	8400	8450	8308	9220	8400	8450	100	100	100	100	100	100
		Fasilitasi Dukungan UPSUS PAJALE (Paket)	16					16					100			
Penyediaan sarana produksi pertanian		Pengembangan irigasi tersier (Paket)	3450	11	150	150	3450	11	150	150	100	100	100	100	100	100
		Pengembangan jalan produksi (Paket)	499	13	1	1	499	13	1	1	100	100	100	100	100	100
		Pengembangan irigasi dalam (Paket)	29	2	2	2	29	2	2	2	100	100	100	100	100	100
Pengembangan bibit unggul pertanian		Pemeliharaan Kebun Entrys (Ha)	2					2					100			
Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Perkebunan		Pengadaan fungisida KAS swadaya (Ha)	100					100					100			
		Pengadaan biopestisida Tricoderma Koningi (Ha)	80					80					100			
Pengembangan Padi Sawah		Tersedianya pupuk NPK (Paket)	7					7					100			
		Tersedianya pestisida (Paket)	5					5					100			
		Tersedianya power traheser (Buah)	50					50					100			
Penyedia Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan (DAK)		Terbangunnya Irigasi Tanah Dangkal (Unit)	5				5						100			
		Terbangunnya JUT (M)	1079				1079						100			
		Terbangunnya Jaringan Irigasi Tersier (Ha)	240				240						100			
Penyediaan sarana produksi perkebunan		Pengadaan bibit kelapa sawit (Ha)	35					35					100			
		Pengadaan bibit karet (Ha)	40					40					100			

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DKPPP TAHUN 2021 – 2026

		Pengadaan Bibit Aren (Ha)		40						40							100			
		Pengadaan Saprodi (Bahan obat-obatan) (Ha)		150						150							100			
Penyediaan sarana produksi pertanian (DAK)		Tersedianya irigasi air tanah (dangkal/dalam) (Paket)		25						25							100			
		tersedianya embung (Paket)		2						2							100			
		tersedianya Dam parit (Paket)		4						4							100			
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan		Peningkatan Kualitas Kinerja penyuluh Pertanian		1						1							100			
Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian		Jumlah Peserta Kegiatan/Sosialisasi/pelatihan (Orang)		1700						1700							100			
Penyuluhan dan Pendampingan Bagi Pertanian/Perkebunan		Terlaksananya Pendampingan Bagi Petani																		
Dukungan Operasional BPP dan Penyuluh Pertanian		Optimalisasi Kinerja Penyuluh (Orang)		2880						2880							100			
Penyusunan Program Penyuluhan Pertanian		Terdokumentasinya program penyuluhan WKPP, BP3K dan kabupaten (Eksemplar)		675						675							100			
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak		Penekanan Angka Kematian Ternak	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	50	50	50	50
Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak		Jumlah Bahan Obat-obatan Yang Tersedia (Paket)	7	7	7	8				7	7	7	8				100	100	100	100
		Tersedianya Peralatan Keswan (Macam)	2	2	2	2				2	2	2	2				100	100	100	100
		Jumlah Ternak Yang divaksin												2000						100
		jumlah ternak yang terobati												1000						100
Pelayanan Kesehatan Hewan		Tersedianya Bahan Obat-Obatan (Paket)	3	3	3	3				3	3	3	3				100	100	100	100
		Terlaksananya Penyuluhan (Orang)	60	120	120	6600				60	120	120	6600				100	100	100	100
		Pelayanan Kesehatan Hewan (Ekor)	1	550	550	120				1	550	550	120				100	100	100	100
		jumlah obat - obatan yang tersedia												1						100
		nilai indeks kepuasan masyarakat												80						100
		jumlah ternak unggul yang disalurkan kepada masyarakat tepat sasaran												6						100
Program Peningkatan Produksi Peternakan		Tersedianya Daging Ternak	1557075							1557075							100			#DIV/0!
		Jumlah Produksi Daging								2000000				1817763						91
		Jumlah Produksi Telur								212000				212000						100
		Jumlah Populasi ternak								221				221						100
Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak		Terbangunnya Kandang Ternak (Paket)	22	51	37	41	45			22	51	37	41	45			100	100	100	100
		Jumlah Kandang Ternak yang terbangun								18				18						100
Pembibitan dan perawatan ternak		Terlaksananya Inseminasi Buatan (IB) (Ekor)	1	450	450	495	545			1	450	450	495	545			100	100	100	100
Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat		Terdistribusinya Ternak Sapi, Kambing, Ayam & Itik (Paket)	11	54	45	50	54			11	54	45	50	54			100	100	100	100
		Jumlah Ternak Sapi Yang terdistribusi												221						100
		Jumlah Ternak Itik Yang terdistribusi												16765						100
		Jumlah Ternak kambing Yang terdistribusi												100						100
Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat		Terlaksananya Jumlah Peserta Kegiatan dan Pelatihan Peternakan (Orang)	585	600	600	660	726			585	600	600	660	726			100	100	100	100

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DKPPP TAHUN 2021 – 2026

		Jumlah Pelatihan dan Penyuluhan					10					10					100
Pengembangan agribisnis peternakan		Terlaksananya Sosialisasi (Orang)	70	140		0	0	70	140		0	0	100	100			
		Terlaksananya Pemeliharaan Ternak Unggas (Ekor)	3	660		0	0	3	660		0	0	100	100			
		Terdistribusinya Ternak Sapi (Ekor)		0		0	0		0		0	0					
		Jumlah Pelatihan dan Penyuluhan					10					10					100
Pembinaan Sentra Kawasan dan Pembibitan Peternakan		Terpelihara Ternak Sapi Pada Sentra Kawasan (Ekor)	110	98	98	108	119	110	98	98	108	119	100	100	100	100	100
		Terlaksananya Peramajaan Lahan Kebun Rumpuk HMT (Tahun)		1	1	1	1		1	1	1	1	#DIV/0!	100	100	100	100
		Kelahiran Ternak Sapi Pada Sentra Kawasan					10					10					100
Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan		Meningkatnya keterampilan hasil olahan produksi peternakan	5			1	1	5			1	1	100			100	100
Promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah		Terikutinya Pameran Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional (Kali)	1	1	3	3	4	1	1	3	3	4	100	100	100	100	100
		Pelatihan Pengolahan Hasil Peternakan (Kali)	2	6				2	6				100	100			
		Terpenuhinya Peralatan Pengolahan Hasil Peternakan (Paket)	1	1				1	1				100	100			
		Terikutinya Pameran Tingkat Provinsi (Kali)		4					4				#DIV/0!	100			
		Jumlah Pameran Peternakan yang diikuti					3					3	#DIV/0!	#DIV/0!			100
Pasca Panen dan Pengolahan hasil Peternakan		Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Hasil Peternakan (Kelompok)			7	8				7	8		#DIV/0!	#DIV/0!	100	100	
		Jumlah Pelaksanaan Pelatihan Pengolahan Hasil Peternakan (Kelompok)					6					6	#DIV/0!	#DIV/0!			100
Penyuluha Kualitas dan Teknis Kenasan Hasil Peternakan yang Di Pasarkan		Jumlah Peserta Kegiatan/ Sosialisasi (Orang)			420	462				420	462		#DIV/0!	#DIV/0!	100	100	
		Jumlah Pelatihan dan Bimbingan Kemasan Produk					1					1	#DIV/0!	#DIV/0!			100
Program Peningkatan Pembenihan dan Produksi Hortikultura		Meningkatnya produksi hortikultura	319			2939	21586	319			2939	21586	100	#DIV/0!			100
Produksi Hortikultura		Pengembangan tanaman lombo (Ha)	9	3		17		9	3		17		100	100			100
		Pengembangan tanaman bawang merah (Ha)	13	2		12		13	2		12		100	100			100
		Pengembangan aneka sayuran (Ha)	2	3		30	40	2	3		30	40	100	100	100	100	100
		Pengembangan tanaman buah pisang (Ha)	9	4		3	4	9	4		3	4	100	100	100	100	100
Pembenihan dan Perlindungan Hortikultura		Terpenuhinya bibit pisang (Ha)		1						1			#DIV/0!	100			
		Bertambahnya Pengetahuan Petani (Orang)		90						90			#DIV/0!	100			
		Terlaksananya SLPHT (Pertemuan)		12						12			#DIV/0!	100			
Program Peningkatan sarana alat alat pengolahan hasil hortikultura		Jumlah peningkatan alat dan mesin serta sarana pengolahan hasil hortikultura	11			2	2	11			2	2	100	#DIV/0!			100
Kegiatan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Hortikultura		Terlaksananya pelatihan teknologi pasca panen dan pengolahan hasil (Kecamatan)	8	8		8	8	8	8		8	8	100	100			100
		Terlaksananya penambahan alat dan mesin pengolahan hasil. (Paket)	5	8		5	5	5	8		5	5	100	100			100
		Terbentuknya rumah kemasan produk pertanian (Unit)	-	1		0	0	-	1		0	0		100			

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DKPPP TAHUN 2021 – 2026

	Program Peningkatan sarana prasarana dan perlindungan hortikultura		Penerapan PHT hortikultura pada lokasi pengembangan kawasan hortikultura (Kelompok)	1		6	7	1		6	7	100		100	100
	Kegiatan Pengembangan sarana prasarana dan perlindungan hortikultura		Jumlah pelaksanaan pelatihan SLPHT (Kali)	1080		72	84	1080		72	84	100		100	100
			Sarana prasarana dan perlindungan hortikultura (macam)			3	3			3	3			100	100
	Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura		Meningkatnya kualitas serta animo masyarakat terhadap produk olahan hortikultura	3				3				100			
	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura		Terlaksananya pelatihan pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura (Kecamatan)	8	8	8	8	8	8	8	8	100	100	100	100
			jumlah petani yang dilatih pengeemasan dan pemasaran hasil olahan hortikultura yang terlaksana				8				8				100
	Promosi atas hasil produksi hortikultura unggul daerah		Terlaksananya Pameran Kabupaten, Provinsi dan Nasional (Kegiatan)		6	6	6		6	6	6		100	100	100
			jumlah kelompok tani yang dibina pasca panen				8				8				100
	Program Peningkatan Produktivitas Perkebunan		Peningkatan Hasil Produksi Perkebunan												
			Jmlah Hasil Produktifitas Perkebunan Karet				1103				1103				100
	Penyediaan sarana produksi perkebunan		Luas Rehabilitasi Lahan Perkebunan (Ha)		140	240	340		140	240	340		100	100	100
	Pengembangan bibit unggul perkebunan		Terpeliharanya Kebun Entres Karet, Terpeliharanya Kebun Koleksi Dinas, dan Terpeliharanya Kebun Kelapa Salak (Ha)		12	24	36		12	24	36		100	100	100
			Jumlah Kebun Entres karet terpelihara				16				16				100
			Luas lahan penangkaran benih unggul yang ditanami				3				3				100
	Pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT) perkebunan		Terkendalnya Organisme Pengganggu Tanaman dan Kebakaran Lahan Perkebunan 347 Ha (Ha)		347	647	947		347	647	947		100	100	100
			Jumlah total organisme pengganggu tanaman yang terkendali dan jumlah kebakaran lahan perkebunan yang teratasi				947				947				100
			jumlah petani yang menerapkan pencegahan OPT perkebunan				947				947				100
	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Pertanian		Meningkatnya Luas Area Tanam Pertanian												
			Persentase petani yang menerapkan teknologi pertanian				10				10				100
	Penyediaan sarana produksi pertanian		tersedianya sarana pertanian (Paket)		9	9	9		9	9	9		100	100	100
			Jumlah sarana pertanian (Paket)				13				13				100

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DKPPP TAHUN 2021 – 2026

Penyediaan prasarana produksi pertanian		tersedianya prasarana produksi pertanian (Paket)	35	35	35			35	35	35			100	100	100
		Jumlah prasarana produksi pertanian (Paket)			12					12					100
Kegiatan Penyediaan sarana produksi pertanian (DAK)															
Pengembangan Produksi Benih Padi Yang Berlabel dan Bersertifikat		Jumlah Produksi Benih Padi Yang Berlabel dan Bersertifikat													
		jumlah benih pokok yang disalurkan kepada penangkar tepat waktu			16					16					100
Pengembangan perbenihan/ perbibitan		Tersedianya Lahan Penangkaran Benih Yang Bersertifikat (Ha)	14	15	16			14	15	16			100	100	100
		Jumlah benih pokok yang disalurkan kepada penangkar tepat waktu			16					16					100
Program Peningkatan Produksi Hortikultura		Meningkatnya Produksi Hortikultura													
		Meningkatnya produktifitas Hortikultura			20					20					100
Kegiatan Produksi Hortikultura		Terlaksananya budidaya tanaman buah (Ton)	18854	19797	20787			18854	19797	20787			100	100	100
		Terlaksananya budidaya tanaman Sayuran (Ton)	849	982	936			849	982	936			100	100	100
		Jumlah penangkaran Tanaman Buah			39					39					100
		Jumlah petani yang menerapkan teknologi modern			19420					19420					100
		Jumlah petani yang menerapkan teknologi modern			891					891					100
Pembenihan Tanaman Hortikultura		Terlaksananya penangkaran tanaman pisang (Ha)	3	3	3			3	3	3			100	100	100
		Terlaksananya penangkaran tanaman Bawang (Ha)	2	2	2			2	2	2			100	100	100
Perlindungan Tanaman Hortikultura		Terlaksananya sekolah lapang pengendalian hama terpadu (SLHPHT) (Orang)	370	370	370			370	370	370			100	100	100
		Jumlah Sekolah lapang Pengendalian hama Terpadu (SLPHT) yang telah dilakukan			3					3					100
		Jumlah Sekolah lapang Pengendalian hama Terpadu (SLPHT) yang telah dilakukan			450					450					100
Program Peningkatan Produksi Tanaman Pangan		Jumlah Produksi Tanaman Pangan													
		Produksi Padi			197716					197716					100
Pelatihan penerapan teknologi pertanian modern bercocok tanam		Jumlah Peserta Keg/Sosialisasi/Pelatihan/Pertemuan (Orang)	5200	6200	6800			5200	6200	6800			100	100	100
		Pengadaan Saprodi mendukung UPSUS PAJALE (Paket)	8	9	10			8	9	10			100	100	100
		Pengadaan Saprodi LL Peserta SL (Paket)	10	10	10			10	10	10			100	100	100
		Pengadaan Alat Ukur (Buah)	4	4	4			4	4	4			100	100	100
		jumlah petani yang menerapkan teknologi modern			5360					5360					100
		luas lahan yang dilakukan UPSUS PAJALE			400					400					100

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DKPPP TAHUN 2021 – 2026

		Produksi Padi			197716				197716				100
Pengembangan padi sawah		Peningkatan Penerapan IP 200 (Ha)	400	500	600			400	500	600			100
		Pengadaan Cadangan Benih Daerah (Tahun)	1	1	1			1	1	1			100
		Optimasi Pengolahan Lahan (Paket)	4	5	6			4	5	6			100
		Jumlah petani yang menggunakan benih unggul			400					400			100
Pengembangan Palawija		Jumlah Peserta Kegiatan/ Sosialisasi / Penyusunan CPCL (Orang)	1260	1360	1460			1260	1360	1460			100
Penerapan PHT tanaman pangan demi peningkatan produksi tanaman pangan		PPDPI (Kegiatan,Orang)	2	8	8			2	8	8			100
		Klinik Perlindungan Tanaman Pangan (Paket)	5	5	5			5	5	5			100
		SLPHT Tanaman Pangan (Kegiatan,Orang)	2	8	8			2	8	8			100
		Gerakan pengendalian OPT TP Kilat			50					50			100
Penekanan luasan kejadian OPT tanaman pangan		Gerakan Penerapan Biopestisida Tanaman Pangan (Kegiatan,Orang)	2	8	8			2	8	8			100
		Penerapan Biopestisida pada Lahan Tanaman Pangan (ha)	50	50	75			50	50	75			100
		Kegiatan Gerakan Penerapan Biopestisida Tanaman Pangan (Kegiatan,Orang)			8					8			100
		Jumlah Petani yang menerapkan PHT			120					120			100
Pembinaan penangkaran tanaman pangan		SL Penangkaran Tanaman Pangan (Kegiatan,Orang)	3	6	8			3	6	8			100
		Mandiri Benih Tanaman Pangan (Ha)	200	20	75			200	20	75			100
		Kegiatan DL penangkaran tanaman pangan yang terlaksana			8					8			100
Penyediaan benih unggul tanaman pangan		Pendaftaran Varietas Lokal Tanaman Pangan (Varietas)	1	1	1			1	1	1			100
		Pemberdayaan Penangkaran Tanaman Pangan (Ha)	100	100	100			100	100	100			100
		Luas lahan penangkaran benih unggul yang ditanami			800					800			100
Program Peningkatan Pengolahan Hasil Tanaman Pangan		Jumlah hasil produksi tanaman pangan yang diolah											
Penyuluhan kualitas dan teknis kemasan hasil produksi pertanian yang akan dipasarkan		Terlaksananya Pelatihan Pengolahan Hasil Pasca Panen TP yang Bernilai Ekonomis, Pelatihan Pengeemasan dan Pemasaran Hasil Olahan TP, Pembinaan Petani dan Wanita Tani (Kegiatan,Orang)	3	4	5			3	4	5			100
		jumlah petani yang dilatih pengeemasan dan pemasaran hasil olahan TP yang terlaksana			480					480			100
Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian tepat guna		Terlaksananya Pelatihan Dryer (Kegiatan,Orang)	2	4	6			2	4	6			100
		Pengadaan Gubuk Pertemuan (Unit)	4	4	4			4	4	4			100
		Mesin Pengayak Gubuk Organik (Unit)	1	2	3			1	2	3			100
		Jumlah Kelompok Tani pasca panen yang dibina			2					2			100

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DKPPP TAHUN 2021 – 2026

Program Peningkatan Produktifitas Penyuluh Pertanian		Fasilitasi Peningkatan Kelembagaan dan SDM Penyuluh														#DIV/0!
		Jumlah Kelompok tani Utama				24					24					100
Peningkatan kapasitas tenaga Penyuluh Pertanian		Jumlah Peserta Kegiatan/Sosialisasi/Pelatihan (Orang)		1700	1800	1900			1700	1800	1900			100	100	100
		Persentase penyuluh yang mengikuti Sosialisasi/Pelatihan				100					100					100
Penyusunan Program Penyuluh Pertanian		Terdokumentasinya Program Penyuluh WKPP, BPP dan Kabupaten (Eksemplar)		675	725	775			675	725	775			100	100	100
		jumlah dokumen program penyuluh WKPP, BPP dan Kabupaten				9					9					100
Peningkatan pengetahuan penerapan teknologi tepat guna bagi penyuluh		Jumlah Peserta Kegiatan / Sosialisasi / Pelatihan (Orang)		550	605	665			550	605	665			100	100	100
		Jumlah petani yang menerapkan teknologi pertanian				300					300					100
Dukungan operasional BPP dan Penyuluh Pertanian		Optimalisasi Kinerja Penyuluh (Tahun)		1	1	1			1	1	1			100	100	100
		Jumlah kinerja penyuluh yang terotimalisasi				74					74					100
		persentase penyuluh yang aktif di BPP				74					74					100
Program Peningkatan Produktifitas Kelembagaan Petani		Fasilitasi Peningkatan Kualitas Kelembagaan Petani				700					700					100
Peningkatan kapasitas SDM Petani		Jumlah Peserta Kegiatan/Sosialisasi/Pelatihan (Orang)		995	1005	1015			995	1005	1015			100	100	100
		Jumlah Petani yang dilatih tepat waktu				800					800					100
Program Peningkatan Pengolahan Hasil Perkebunan		Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana Perkebunan														
		Jumlah Luas Areal perkebunan				38689					38689					100
Pengadaan sarana dan prasarana teknologi perkebunan tepat guna		Terlaksananya Penyediaan Sarana dan Prasarana Perkebunan (Paket)		12	34	56			12	34	56			100	100	100
		Jumlah Sarana dan Prasarana perkebunan Yang Tersedia				16					16					100
		Jumlah Prasarana pasca panen				13					13					100
Promosi atas hasil produksi perkebunan unggul daerah		Terlaksananya Promosi Hasil Produksi Perkebunan Unggul Daerah (Kegiatan)		3	6	9			3	6	9					100
Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi perkebunan tepat guna		Terlaksananya Penyuluhan Pendampingan, Serta Pembinaan Petani Perkebunan (Kegiatan)		3	6				3	6				100	100	#DIV/0!
		Jumlah Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Perkebunan Tepat Guna yang Dilaksanakan				19					19					100
		Jumlah Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Perkebunan Tepat Guna yang Dilaksanakan				10					10					100

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DKPPP TAHUN 2021 – 2026

Program Peningkatan Produktifitas Penyuluh Pertanian			1.354.846.700	1.412.245.700	1.452.246.708	-	-	1.076.989.746	792.581.034	968.205.210								
Peningkatan kapasitas tenaga Penyuluh Pertanian			271.745.700	287.745.700	297.745.700			190.412.975	79.840.678	95.529.684			78,91	56,12	66,67	1.409.780.036	567.555.198	
Penyusunan Program Penyuluh Pertanian			154.775.000	168.025.000	178.025.008			136.973.007	135.049.356	22.301.426			88,50	80,37	12,53	166.941.669	98.107.990	
Peningkatan pengetahuan penerapan teknologi tepat guna bagi penyuluh			172.376.000	175.526.000	185.526.000			93.393.973	10.413.000	47.920.000			54,18	5,93	25,83	177.809.333	50.575.658	
Dukungan operasional BPP dan Penyuluh Pertanian			765.950.000	780.950.000	790.950.000			656.209.791	567.278.000	862.454.100			85,67	72,64	109,04	779.283.333	695.313.964	
Program Peningkatan Produktifitas Kelembagaan Petani			264.330.000	266.980.000	271.980.000	-	-	223.330.101	35.260.000	55.034.000								
Peningkatan kapasitas SDM Petani			264.330.000	266.980.000	271.980.000			223.330.101	35.260.000	55.034.000			84,49	13,21	20,23	267.763.333	62.724.820	
Program Peningkatan Pengolahan Hasil Perkebunan			3.743.710.000	-	4.118.081.000	-	-	3.441.062.900	2.090.794.900	1.949.793.900								
Pengadaan sarana dan prasarana teknologi perkebunan tepat guna			3.298.177.500	-	3.627.995.250			3.089.539.900	1.765.307.800	1.866.441.900			91,92		47,35	2.620.597.000	1.496.330.340	
Promosi atas hasil produksi perkebunan unggul daerah			266.547.500	-	293.202.250			192.423.000	199.398.300	-			93,67		51,45	2.308.724.250	2.240.429.867	
Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi perkebunan tepat guna			178.985.000	-	196.883.500			159.100.000	126.088.800	83.352.000			72,19		0,00	186.583.250	130.607.100	
													88,89		42,34	125.289.500	122.846.933	

Berdasarkan pada Tabel T-C 23 dan T-C 24 terlihat capaian kinerja Program secara keseluruhan menunjukkan hasil yang bagus karena capaian kinerja pelayanan rata-rata secara keseluruhan mencapai target dan dari segi pendanaan terlihat hasil yang cukup baik meskipun di Tahun ke-5 ada penurunan penyerapan anggaran, hal ini dikarenakan terjadinya pandemi Covid 19 yang ada di Indonesia yang mengakibatkan pelaksanaan kegiatan mengalami banyak kendala, Penyerapan anggaran menjadi perhatian yang besar bagi pimpinan SKPD untuk bisa meningkatkan kinerja bawahan sehingga lambatnya penyerapan anggaran bisa segera di tindak lanjuti.

Dukungan Program terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD Provinsi) terhadap kebijakan pembangunan pertanian Nasional dengan aktor utama di kabupaten adalah Bupati, Camat, BPP, Kepala Desa/Lurah, Petugas Lapangan dan Petani/poktan sangat didukung dengan adanya Kostra Tani (Komando Strategis Petani) yang merupakan salah satu program jangka pendek (100 hari kerja) Menteri Pertanian, selain menyamakan data (single data), menjamin ketersediaan pangan 3 bulan ke depan, perbaikan konsep asuransi dan inisiasi bank pertanian serta penguatan manajemen pembangunan pertanian. Kostra Tani di Kabupaten Balangan ada di 8 Kecamatan yang fokusnya ada di BPP se-Kabupaten Balangan. Keberadaan Kostra Tani untuk mendukung Kebijakan Pertanian Nasional dengan program utamanya adalah :

1. Peningkatan Kompetensi, Inovasi dan kreatifitas SDM Pertanian melalui Pendidikan dan Pelatihan Vakasi
2. Fasilitasi Pembiayaan, Infrastruktur, dan Alsintan
3. Gerakan Peningkatan Produksi 7%, Nilai Tambah, dan Daya Saing Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan berbasis kawasan dan korporasi petani
4. Peningkatan populasi, produktivitas dan mutu genetik ternak potong/unggas
5. Akselerasi pemanfaatan inovasi teknologi dan produksi benih/bibit

6. Pengembangan diversifikasi pangan, family farming, dan Pertanian Masuk Sekolah
7. Pengawasan Distribusi Pangan, dan pengendalian harga pangan pokok
8. Penguatan layanan perkarantinaan
9. Pemanfaatan KUR Rp. 50T pertahun
10. Penurunan Losses dari 12% menjadi 5% 1
11. Peningkatan efisiensi biaya produksi
12. Integrasi dan kolaborasi data dan kebijakan pertanian
13. Transformasi Digital sektor Pertanian
14. Mencegah konversi lahan pertanian produktif

Hal ini secara umum sudah dilaksanakan melalui dukungan program yaitu Program Peningkatan Kapasitas SD Aparatur, Program peningkatan kesejahteraan Petani, Promosi atas hasil produk unggulan daerah, Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan, Program Peningkatan produksi pertanian/perkebunan, Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak, Program peningkatan produksi peternakan, Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan, Program peningkatan pembenihan dan produksi hortikultura, Program peningkatan sarana alat-alat pengolahan hasil hortikultura, Program peningkatan sarana alat-alat pengolahan hasil hortikultura, Program peningkatan sarana dan prasarana perlindungan hortikultura, Program peningkatan pengolahan dan pemasaran hasil hortikultura, Program peningkatan produktifitas perkebunan, program peningkatan prsarana dan sarana pertanian, program peningkatan hortikultura, Program peningkatan produksi TP, Program peningkatan pengolahan hasil TP, Program peningkatan kelembagaan petani.

Sumber-sumber anggaran selain APBD Kab. Balangan sangat membantu untuk meningkatkan hasil produksi bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan. Begitu juga dengan pelaksanaan KUR Tani yang ada di Kabupaten Balangan sudah sangat di fasilitasi agar bisa tersalur kepada petani yang membutuhkan terutama pada saat pandemi

sekarang ini, petani-petani sangat membutuhkan permodalan dengan suku bunga rendah dan angsuran yang bisa di bayarkan setelah panen.

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Balangan sudah mulai melaksanakan pengarusutamaan gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di mana peran gender dalam hal adopsi teknologi pertanian. Karena sudah dari dulu sejarah gender dalam pertanian memang ada dimulai dari pembagian kerja, yaitu :

2. Menurut jenis kelamin

Laki-laki : Berburu, Meramu

Perempuan : Mengumpulkan, memproses dan memasak

3. Menurut Teknologi/Peralatan Pertanian :

Pengeringan, pengasapan, penyimpanan oleh perempuan

Membuat benih, menanam disekitar rumah, pengawetan hasil

Perempuan identik dengan alam (Nature)

Ranah domainnya adalah disekitar rumah

Streotype gender di pertanian dengan pekerjaan hardwork adalah untuk laki-laki dan pekerjaan softwork identik dengan perempuan. Hal tersebut diterapkan pada kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Pertanian dimana terdapat kelompok-kelompok tani, kelompok perikanan, kelompok perkebunan dan kelompok wanita tani. Dimana Bantuan pemerintah yang diserahkan kepada masyarakat melalui kelompok-kelompok tani yang ada di Kab. Balangan. Peran gender di sektor pertanian dan perikanan sudah ada seperti yang sudah dijelaskan bahwa peran gender untuk perempuan pada sektor pertanian dan perikanan banyak terdapat pada kegiatan pemasaran hasil dan pengolahan pasca panen baik itu peternakan, perkebunan, hortikultura dan Tanaman Pangan serta Perikanan. Sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan

Perikanan salah satunya adalah menyusun program anggaran yang responsif gender.

Program-program yang menerapkan pengarusutamaan gender antara lain adalah :

1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian,
2. Program Pengendalian dan Penanggulangan bencana pertanian,
3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
4. Program Penyuluhan Pertanian,
5. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat,
6. Program Penanganan Kerawanan Pangan,
7. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dan
8. Program Pengolahan dan pemasaran hasil Perikanan.

Ada 8 (delapan) program yang menerapkan pengarusutamaan Gender (PUG) pada tahapan perencanaan dari 14 Program yang dilaksanakan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Balangan sekitar 57% Program sudah menerapkan PUG.

2.3 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan PD

Sektor pertanian memegang peranan cukup penting dalam perekonomian nasional. Hal ini disebabkan karena sektor pertanian merupakan Resource Based yang mampu menyerap dan memperluas kesempatan usaha/lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Berdasarkan analisis faktor internal, eksternal, potensi dan permasalahan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan dapat diidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan pertanian dan perkebunan lima tahun ke depan.

2.3.1 Tantangan

- Keterbatasan lahan dan laju alih fungsi lahan yang tinggi menyebabkan berkurangnya lahan pertanian produktif,;

- Angka kemiskinan di Kabupaten Balangan masih cukup tinggi yang sebagian besar merupakan masyarakat petani;
- Kualitas SDM petani yang relatif masih rendah, membatasi kemampuan petani dalam penguasaan dan inovasi teknologi, sehingga sistem budidaya yang digunakan masih banyak yang tradisional;
- Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh petani masih perlu dibenahi/penambahan
- Rendahnya permodalan yang dipunyai petani, membatasi petani untuk membeli sarana produksi dan sarana pertanian;
- Kelembagaan petani (walaupun jumlahnya besar) kemampuannya relative masih rendah;
- Minat generasi muda terhadap pertanian relatif rendah
- Masih kurangnya petugas baik itu dikantor maupun dilapangan serta masih ada pejabat kepala seksi yang belum diisi.
- Rendahnya implementasi yang mencakup struktur organisasi, dokumentasi, pengendalian dan tanggap darurat
- Kurangnya pemeriksaan regular dan tindakan perbaikan yang mencakup pemantauan, pengukuran dan audit
- Kurangnya kajian tentang kesesuaian dan efektifitas sistem untuk mencapai tujuan dan perubahan yang terjadi didalam organisasi

2.3.2 Peluang

- Adanya lahan yang potensial baik itu lahan tadah hujan, lahan kering maupun lahan lebak.
- Kebutuhan penduduk akan bahan pangan (khususnya beras) terus meningkat, sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk;
- Adanya dukungan dari pihak luar baik itu swasta maupun pemerintah.
- Berkembangnya industri makanan olahan dengan bahan baku hasil tanaman pangan, menjadi peluang pasar yang potensial;
- Teknologi budidaya pertanian yang terus berkembang dan dikembangkan, baik untuk meningkatkan produktivitas maupun untuk meningkatkan mutu hasil pertanian tanaman pangan;

- Tingginya animo masyarakat-petani untuk meningkatkan kemampuannya dalam penguasaan teknologi dan penggunaan peralatan (sarana) pertanian modern untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas usaha tani;
- Tersedianya dana pembangunan pertanian yang cukup memadai yang secara otonom dapat direncanakan dan diarahkan sesuai kebutuhan lokal;
- Adanya pengelolaan sumberdaya alam baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui melalui penerapan teknologi ramah lingkungan dengan memperhatikan daya dukung dan tampungnya
- Mampu memberdayakan masyarakat dan kekuatan ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alam dan manusia serta lingkungan secara berlanjut.
- Tingginya kesadaran konsumen akan arti penting komoditas hortikultura yang mempunyai kontribusi kepada aspek kesehatan, estetika dan lingkungan
- Masyarakat yang makin kritis menjadi tantangan untuk selalu meningkatkan kualitas kinerja pelayanan bagi aparat Dinas;
- Dukungan Pemerintah Pusat yang cukup signifikan dalam bentuk pendanaan Dana Alokasi Khusus, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan APBN.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi PD

Penyelenggaraan Pembangunan Sektor Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dalam kurun waktu 2016-2021 telah membuahkan hasil yang diharapkan, namun demikian pembangunan sektor Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan kedepan masih terdapat persoalan dan tantangan dari berbagai aspek yang di hadapi. Berikut Tabel T-C.25 Pemetaan Permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

Tabel T-B.35.
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pertumbuhan kontribusi Sektor Pertanian dan Perikanan Masih Rendah	Produktivitas padi sawah dua tahun terakhir (2018-2019) menurun dari 5,5 ton/ha menjadi 4,4 ton/ha	petani menanam padi sawah tidak serentak karena jaringan pengairan yang tidak maksimal dan tipologi lahan yang berbeda, kondisi iklim/cuaca dan peningkatan serangan OPT yang berdampak pada produksi dan produktivitas padi sawah serta proses panen dan pascapanen masih kurang optimal sehingga terjadi kehilangan hasil panen atau padi yang terbuang saat panen maupun saat perontokan

		<p>Luas panen, produksi dan produktivitas padi gogo terus meningkat dalam 5 tahun terakhir (2015-2019) tetapi produktivitas masih rendah yaitu 3,6 ton/ha (Produktivitas nasional 4-6 ton/ha).</p>	<p>petani masih banyak menanam varietas lokal (karena adanya tradisi masyarakat dayak /kearifan lokal yang harus mereka lestarikan, setiap keluarga masyarakat dayak Balangan memiliki kewajiban menanam varietas lokal tertentu)</p> <p>kondisi wilayah untuk menanam padi gogo sehingga penanaman padi gogo hanya dilakukan 1x setahun (IP 100) dan orientasi petani dalam menanam padi gogo ini sebagian besar hanya untuk konsumsi keluarganya dan pemenuhan kewajiban persembahan saat kegiatan adat dayak (aruh ganal)</p> <p>proses panen dan pascapanen masih kurang optimal sehingga terjadi kehilangan hasil panen atau padi yang terbuang saat panen maupun saat perontokan.Selain padi sawah dan padi gogo, tanaman pangan yang mempunyai potensi besar di Kabupaten Balangan adalah jagung</p>
		<p>Luas panen, produksi dan produktivitas jagung dari tahun 2015-2019 terus meningkat</p>	<p>petani jagung di Kabupaten Balangan memiliki kepastian pasar sehingga ada kepastian produksi yang dihasilkan akan terjual.</p> <p>proses pasca panen jagung belum optimal yaitu sebagian petani masih ada yang menjual dalam bentuk tongkol (harga jual jagung bentuk tongkol lebih rendah dari jagung pipil) dan proses pengeringan kadar air jagung juga belum optimal.</p>

		Rendahnya produktivitas tanaman hortikultura dan tanaman obat-obatan	belum optimalnya teknik budidaya dan pemeliharaan baik tanaman hortikultura maupun obat-obatan; kurangnya pengetahuan petani tentang teknik budidaya hortikultura dan obat-obatan
			kurangnya minat dan modal dalam budidaya hortikultura dan obat-obatan
		belum berkembangnya sektor hilir (agroindustri)	masih rendahnya nilai tambah sektor pertanian komoditas unggulan, karena petani hanya melaksanakan penanaman, panen dan langsung menjual hasil panen mereka ke pasar atau pengepul
			kurang berminat untuk melakukan pengolahan pasca panen
		rendahnya penambahan populasi ternak dari potensi (kapasitas tampung)	ternak di Kabupaten Balangan masih dalam tahap penambahan populasi ternak sehingga ternak tersebut tidak untuk produksi daging
			Rumah Potong Hewan (RPH) Kabupaten Balangan belum berfungsi sebagaimana mestinya
		harga jual karet masih belum kompetitif	harga karet sangat dipengaruhi K3 (Kadar Kering Karet) dan timbangannya
			kurang optimalnya penerapan bokar bersih karena pabrik/ pasar hanya mengedepankan pemenuhan bahan baku
			belum memiliki pabrik pengolahan karet (Crumb Rubber Factory) dan industri hilir karet
		luas lahan tanaman karet yang sudah masuk umur tidak produktif dan rusak hampir 1.300 ha	peremajaan tanaman karet

		belum berkembangnya sektor hilir (agroindustri) tanaman aren	rendahnya nilai tambah aren
		kurangnya optimalisasi pengelolaan dan pemanfaatan teknologi tepat guna bagi usaha perikanan	Kurangnya pemahaman pembudidaya tentang Cara Budidaya Ikan yang baik dan masih kurangnya sarana prasarana perikanan
		Penurunan kualitas perairan	kerusakan lingkungan karena sistem budidaya yang tidak sesuai
		Kurangnya daya saing produksi hasil perikanan	Kurangnya kapasitas kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan
		Belum optimalnya Produksi Bibit ikan	Debit dan volume air masukan yang kecil, kurangnya sarana prasarana pembenihan
2	Ketersediaan Pangan yang Fluktuatif dan Infrastruktur yang rendah	Belum meratanya ketersediaan, konsumsi dan akses pangan	tingginya ketergantungan pangan beras dibandingkan pangan utama lainnya, proporsi konsumsi karbohidrat melebihi standar dan belum diimbangi dengan proporsi konsumsi pangan protein dan lemak
		Terbatasnya infrastruktur pendukung akses dan distribusi pangan	Keterbatasan infrastruktur pendukung akses dan distribusi pangan
		sentra Pemasaran hasil produksi pangan	Belum tersedianya sentra pemasaran hasil produksi pangan sehingga banyaknya hasil pangan dijual keluar daerah/luar kabupaten
		Optimalisasi Diversifikasi	Kurang optimalnya diversifikasi pangan

	SDM tenaga pemantau ketersediaan pangan dan sarana prasarannya	Terbatasnya SDM tenaga pemantau ketersediaan pangan dan sarana prasarannya
	Kesadaran Masyarakat Untuk Memanfaatkan Lahan Pekarangan	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan lahan pekarangan
	Akses pendukung Ketahanan Pangan	Masih adanya desa rawan pangan yang dipengaruhi oleh belum optimalnya akses pendukung ketahanan pangan
	Teknologi pangan Olahan	Masih terbatasnya ketersediaan teknologi pangan olahan
	Harga pangan Yang Fluktuatif	Masih terbatasnya ketersediaan beberapa jenis bahan pangan yang menyebabkan harga bahan pangan sangat berfluktuatif

Permasalahan yang dihadapi dalam rangka pembangunan pertanian di kabupaten Balangan antara lain :

- a. Rendahnya regenerasi petani dari Petani tua ke Petani muda
- b. Menurunnya luas panen, produksi dan produktivitas padi sawah
- c. Peningkatan Luas panen dan produksi padi gogo tetapi produktivitas masih lebih rendah dibanding padi sawah
- d. Rendahnya produktivitas tanaman hortikultura dan tanaman obat-obatan di Kabupaten Balangan
- e. Rendahnya penambahan populasi ternak dari potensi (kapasitas tampung) seperti sapi, kambing, ayam buras dan itik
- f. Harga jual karet masih belum kompetitif
- g. Jumlah dan Luas lahan tanaman karet yang sudah masuk umur tidak produktif sangat tinggi
- h. Rendahnya kualitas SDM (Pengetahuan dan Keterampilan) petani dan Peternak
- i. Penggunaan Teknologi tepat guna untuk bidang pertanian dan peternakan masih rendah
- j. Proses pasca panen jagung belum optimal membuat harga jagung masih rendah

3.2 Telaahan Terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021 – 2026 maka visi dan misi dalam RPJMD adalah :

a. Visi

Untuk menyikapi permasalahan pembangunan yang masih harus dihadapi di Kabupaten Balangan maka dicanangkanlah Visi Pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 yang merupakan visi Bupati/Wakil Balangan terpilih periode 2021–2026, yaitu:

“MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA”

Visi di atas bermaksud bahwa Maju dan Sejahtera yang hakekatnya merupakan bentuk realisasi kewajiban dan tanggungjawab pemimpin untuk menciptakan keadaan yang lebih baik. Istilah "Maju dan Sejahtera" menunjuk pada sebuah keadaan yang lebih baik dan maju dari keadaan yang sebelumnya, yang memiliki arti kemuliaan. Sehingga, dengan Visi "Kabupaten yang lebih maju dan sejahtera" diharapkan dapat tercipta situasi, kondisi, tatanan dan pembangunan yang lebih dapat dinikmati dan dirasakan bagi seluruh masyarakat Balangan. Hal ini adalah penerjemahan langsung dari negeri yang makmur yang diridhoi oleh Allah SWT.

Dengan demikian, pada hakekatnya wajah dari sebuah "kabupaten yang lebih maju dan sejahtera", adalah sebuah profil Kabupaten Balangan yang memiliki masyarakat yang berkemajuan dari sisi pembangunan, Kehidupan masyarakat yang agamis, keadaan yang tertib dan aman, sena masyarakat yang sejahtera. Dalam arti yang lebih luas adalah Hasil pembangunan Kabupaten Balangan dapat dinikmati dan dirasakan oleh Masyarakat Balangan, berdayaguna dan berhasil guna, serta dapat meningkatkan pendapatan Masyarakat untuk menuju Masyarakat sejahtera, agamis, aman, dan damai. Dari sisi lain muncul slogan masyarakat Kabupaten Balangan yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik dan berbudaya, serta membawa nilai religius yang tinggi, dilandasi dengan sikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, bersih dari KKN dan sungguh-sungguh melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Sehingga, Kabupaten Balangan secara umum akan lebih berkarakter untuk dapat menempatkan diri sebagai kabupaten yang tidak selalu berada di bawah, tetapi Kabupaten yang sejajar dengan Kabupaten tetangga, lebih maju dan sejahtera.

b. Misi

Beranjak dari visi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2021-2026 tersebut, dan untuk mengarahkan pencapaiannya, selanjutnya dicanangkan misi pembangunan Kabupaten Balangan Tahun 2021- 2026, yaitu:

1. Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur perdesaan dan perkotaan
2. Meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian dan perkebunan serta pariwisata dan Ekonomi kreatif
3. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat Balangan
4. Meningkatkan kualitas dan layanan birokrasi pemerintahan sebagai abdi masyarakat dan abdi negara
5. Mewujudkan kehidupan sosial, budaya, dan agama serta pemerintahan yang harmonis dan kondusif

Berdasarkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD Kabupaten Balangan 2021 – 2026, maka pertanian akan mendukung pelaksanaan misi ke 2 yaitu meningkatkan perekonomian masyarakat Balangan berbasis pertanian dan perkebunan serta pariwisata kreatif, melalui program yang ada di Dinas Pertanian yaitu :

1. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
2. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA
3. PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
4. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
5. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN
6. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
7. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
8. PROGRAM PENGENDALIAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN
9. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
10. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN
11. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
12. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
13. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan sebagai leading sektor bidang perekonomian kabupaten balangan juga

mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan ekonomi kerakyatan melalui program-program peningkatan prasarana dan sarana serta pembinaan yang dilakukan selama ini. Program – program peningkatan Prasarana dan sarana serta pembinaan yang sudah dilaksanakan merupakan upaya untuk meningkatkan produksi sektor pertanian dan perikanan. Dalam upaya mewujudkan misi tersebut diatas, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan berperan untuk meningkatkan hasil produksi komoditi unggulan baik dari sektor Pertanian dan Perikanan.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Propinsi

Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Balangan adalah bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Pusat dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang dituangkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPP) 2005-2025 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (RPJMD) 2016-2021.

Berdasarkan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, telah ditetapkan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 adalah :

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Indikator kemajuan Indonesia adalah negara yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian sesuai Pancasila dan Undang-undang Dasar (UUD) 1945. Visi bagi Indonesia berdasarkan Pembukaan UUD 1945 yaitu sebuah negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Penjabaran pembangunan nasional dalam RPJPN 2005-2025 dalam visi dan misi Presiden disederhanakan dengan 5 (lima) arahan Presiden yang akan dicapai dalam waktu lima tahun (2020-2024), yaitu :

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pembangunan SDM ini diarahkan untuk mencetak SDM (pekerja) keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industry dan talenta global.

2. Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3. Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan Undang-undang Cipta Lapangan Kerja dan Undang-undang Pemberdayaan UMKM.

4. Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang dan menyederhanakan eselonisasi.

5. Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan Sumber Daya Alam (SDA) menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mendukung visi Presiden dan Wakil Presiden serta arahan Presiden tersebut maka Kementerian Pertanian menetapkan visi Pertanian Jangka Menengah 2020-2024 yakni :

**“Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern
untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri
dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”**

Kondisi tersebut bisa tercapai dengan mewujudkan pertanian Indonesia yang maju, mandiri, dan modern dengan kriteria yang selaras dengan Visi Presiden dan Wakil Presiden. Majunya sektor pertanian ditandai dengan meningkatnya produksi dan produktivitas komoditas pangan serta mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri (pangan mandiri) yang pada akhirnya mampu meningkatkan pendapatan petani. Kemajuan dan kemandirian di sektor pertanian diwujudkan dengan peningkatan hasil pengembangan penelitian

terapan didukung oleh kualitas SDM dalam menggunakan teknologi modern berbasis kawasan pertanian.

Visi Presiden di atas diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua sebagai bentuk percepatan, pengembangan dan pemajuan Nawa Cita I. Adapun sembilan misi tersebut adalah :

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan
7. terpercaya;
8. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada
9. seluruh warga;
10. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
11. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dalam menerapkan Misi Presiden dan Wakil Presiden, maka Kementerian Pertanian mendukung mewujudkan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing melalui misi Kementerian Pertanian yaitu :

1. Mewujudkan ketahanan pangan,
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, serta
3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan prasarana Kementerian Pertanian.

Pembangunan pertanian diarahkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dengan meningkatkan ketahanan pangan dan daya saing pertanian. Salah satu tujuan utama pembangunan pertanian adalah meningkatkan kehidupan petani dan keluarganya yang lebih baik dan sejahtera. Hal tersebut bisa diraih dengan meningkatnya ketahanan pangan, nilai tambah dan daya saing pertanian. Kesejahteraan petani merupakan dampak (impact) dari tercapainya outcome program/kegiatan pembangunan pertanian.

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup ditinjau dari jumlah maupun mutu. Selain itu, menjamin pangan yang aman,

beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Daya saing pertanian adalah kemampuan di sektor pertanian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mampu menggantikan produk pesaingnya dengan nilai tambah yang dihasilkan dalam setiap kegiatan produksi dan distribusi komoditas pertanian.

Tujuan Kementerian Pertanian 2020-2024 sesuai dengan Visi dan Misi Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Pemantapan Ketahanan Pangan, dengan indikator :

- a. Global Food Security Index (GFSI) dengan target skor 62,6 (Th. 2020) dan 69,8 (Th. 2024),
- b. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) dengan target 90,4 (Th. 2020) dan 95,2 (Th. 2024), Angka Kecukupan Energi (AKE) dengan target 2.100 Kkal/kapita/hari hingga tahun 2024, Angka Kecukupan Protein (AKP) 57 gr/kapita/hari hingga tahun 2024,
- c. Prevalence of Under-nourishment/PoU (Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan) dengan target 6,2% (Th. 2020) dan 5,0 % (Th. 2024),
- d. Food Insecurity Experience Scale/FIES (Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan Sedang atau Berat) dengan target senilai 5,2 (Th. 2020) dan nilai 4,0 (Th. 2024),
- e. Ketersediaan beras dengan target 39,2 juta ton (th. 2020 dan 46,8 juta ton (th. 2024),
- f. Ketersediaan protein hewani dengan target 2,50 juta ton (Th. 2020) dan 2,90 juta ton (Th. 2024),
- g. Akses terhadap beras biofortifikasi dan fortifikasi bagi keluarga yang kurang mampu dan kurang gizi dengan target 10-20% penerima BPNT (Th. 2020) dan 100% (Th. 2024),
- h. Persentase pangan organik dengan target 5% (Th. 2020) dan 20% (Th. 2024).

2. Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian, dengan indikator :

- a. Nilai tambah per tenaga kerja dengan target Rp. 49,3 juta/tenaga kerja (Th. 2020) dan Rp. 59,8 juta/tenaga kerja (Th. 2024),
- b. Peningkatan PDB Pertanian Sempit dengan target 3,36% (Th. 2020) dan 3,76% (Th. 2024),
- c. Pertumbuhan PDB Perkebunan dengan target 4,9% (Th. 2020) dan 5,0% (Th. 2024),
- d. Pertumbuhan PDB Hortikultura dengan target 5,8% (Th. 2020) dan 5,9% (Th. 2024),
- e. NTP dengan target 103 (Th. 2020) dan 105 (Th. 2024).

3. Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian, dengan indikator :

- a. Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian dengan target skor 79,96 (Th. 2020) dan 82,96 (Th. 2024),
- b. Opini BPK RI dengan target WTP hingga tahun 2024.

Pembangunan pertanian secara nasional dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian. Dimana dalam membangun pertanian Indonesia, Kementerian Pertanian mencanangkan 4 (empat) sasaran strategis pertanian :

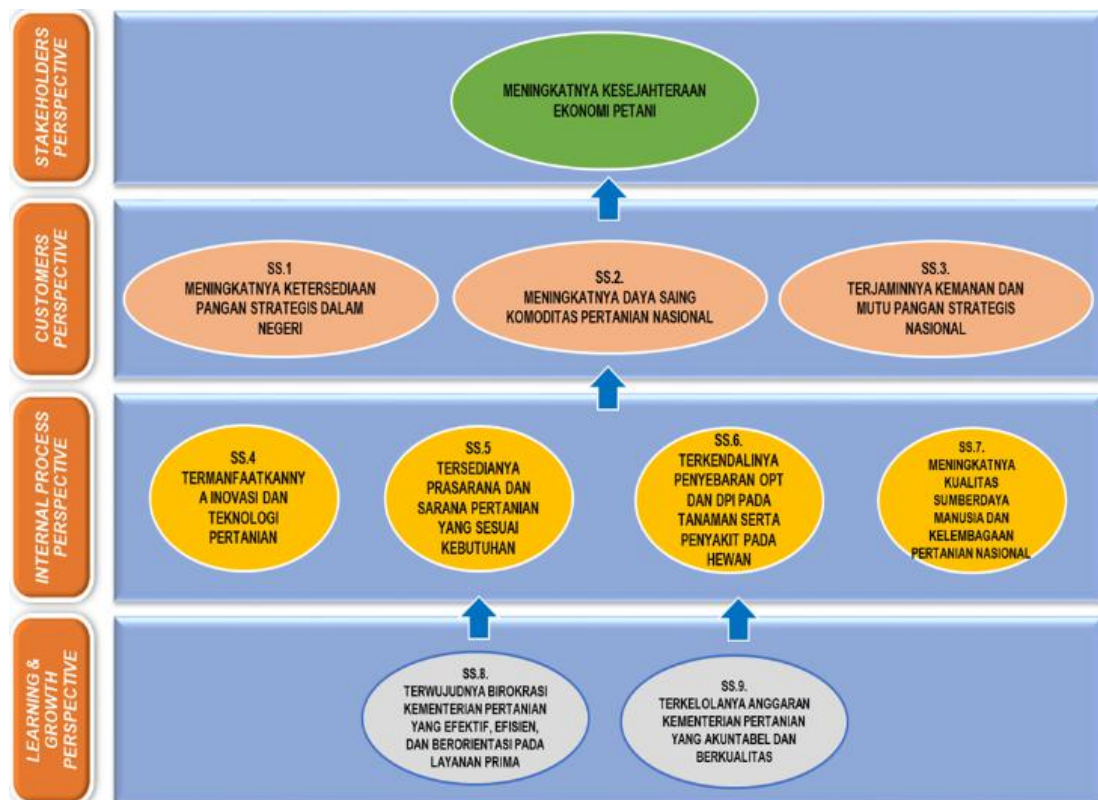
1. Meningkatnya Ketahanan Pangan dengan penyediaan bahan pangan pokok (padi, jagung, kedelai, gula, daging, dan lainnya)
2. Meningkatnya ekspor dan substitusi impor produk pertanian
3. Meningkatnya ketersediaan bahan baku bioindustri dan bio-energi
4. Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani

Sasaran strategis pembangunan perikanan budidaya merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Ditjen Perikanan Budidaya sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran Strategis (SS) DJPB tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat perikanan budidaya
2. Ekonomi sektor perikanan budidaya meningkat
3. Pengelolaan kawasan perikanan budidaya yang berkelanjutan
4. Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya
5. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sumberdaya perikanan budidaya yang partisipatif
6. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Balangan adalah bagian dari Rencana Kerja Pemerintah Pusat dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang dituangkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (RPJMD) 2021-2026. Pembangunan pertanian secara nasional dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian. Dimana dalam membangun pertanian Indonesia, Kementerian Pertanian menggunakan metode Balanced Scorecard (BSC) dan pendekatan empat perspektif yaitu stakeholders, customer, internal process dan learning and growth perspective.



Sasaran strategis pembangunan perikanan budidaya merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Ditjen Perikanan Budidaya sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan. Sasaran Strategis (SS) DJPB tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- Meningkatnya kesejahteraan masyarakat perikanan budidaya
- Ekonomi sektor perikanan budidaya meningkat
- Pengelolaan kawasan perikanan budidaya yang berkelanjutan
- Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya
- Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sumberdaya perikanan budidaya yang partisipatif
- Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-Isu Strategis Meliputi aspek internal (Intern Organisasi dalam semua aspek) dan eksternal (terkait dengan Keadaan, Kondisi, Permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat). Isu-Isu Aktual yang dihadapi Oleh Dinas ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan dikelompokkan kedalam beberapa bagian berdasarkan permasalahan local yang dihadapi oleh bidang teknis di Dinas ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan. Isu-Isu Strategis Aktual yang dihadapi sebagai Berikut :

3.5.1 Peningkatan Peran Sektor Ketahanan Pangan :

1. mendorong produksi komoditas pangan melalui membangun sarana prasarana dan penggunaan teknologi
2. merevitalisasi sistem pangan daerah dengan memperkuat korporasi petani atau nelayan dan distribusi pangan
3. meningkatkan produktivitas pangan

3.5.2 Peningkatan Peran Sektor Pertanian :

1. Peningkatan penataan penggunaan tanah, sehingga lahan pertanian yang produktif tetap dipertahankan
2. Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura, obat-obatan, perkebunan dan peternakan

3. Pembuatan jaringan irigasi pertanian untuk menunjang pelaksanaan IP200 dan IP300
4. Peningkatan mutu kualitas karet dan melakukan peremajaan (replanting) tanaman karet
5. Menambah populasi ternak dari poternsi (kapasitas tampung)
6. Meningkatkan fungsi Rumah Potong Hewan (RPH)
7. Diversifikasi komoditi pertanian
8. Revitalisasi pengolahan hasil pertanian (sektor hilir = agroindustri) dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan daya saing hasil olahan produk pertanian
9. Perlu pengembangan sektor dan komoditas unggulan berbasis sumber daya lokal dan terbarukan antara lain seperti Pengembangan Pusat Agribisnis, terutama untuk pasar-pasar domestik dan pasar regional

3.5.3 Peningkatan Peran Sektor Perikanan :

1. Memperkuat dan mengembangkan usaha perikanan tangkap secara efisiensi, lestari dan berbasis kerakyatan.
2. Menggalakkan dan mengembangkan perikanan budidaya yang berdaya saing dan berwawasan lingkungan.
3. Memelihara keberlanjutan sumberdaya kelautan dan perikanan serta ekosistem lautan, pesisir dan perairan tawar.
4. Meningkatkan dan memperkuat pengawasan dan pengendalian dalam pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan.
5. Mengembangkan dan memperkokoh industri perikanan budidaya, tangkap dan pengolahan serta pemasaran hasil perikanan.
6. Meningkatkan pembangunan perikanan secara berkelanjutan dan berbasis masyarakat.
7. Pemberdayaan sosial ekonomi pembudidaya ikan
8. Mengembangkan DIKLATLUH (Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan) guna memperkuat kualitas dan kuantitas SDM Kelautan dan perikanan

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

4.1.1 Tujuan

Untuk mendukung visi “**MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA**”, yang dijabarkan dalam misi kedua yaitu “**MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT BALANGAN BERBASIS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN SERTA PARIWISATA KREATIF**” maka tujuan yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2021 – 2026 yaitu Meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat, dengan sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi. Mengacu pada misi yang telah ditetapkan maka tujuan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yang hendak dicapai dari pelaksanaan pembangunan Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan 2026 adalah Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi

dengan indikator Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Perkebunan dan Perikanan 13,89 %

4.1.2 Sasaran

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan Menetapkan Sasaran Strategis Berdasarkan pada RPJMD kabupaten Balangan 2021-2026, faktor-faktor keberhasilan sasaran strategis yang merupakan bagian integral dalam proses perencanaan Strategis dinas. Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan selama Tahun 2021 – 2026 yaitu Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Lebak secara lengkap tersaji pada tabel T-C. 25.

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DKPPP TAHUN 2021 – 2026

Tabel T-C.25.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan (%)	12,64	12,89	13,14	13,39	13,64	13,89

Dalam Perkembangannya kabupaten balangan dari sektor Pertanian dan Perikanan sangat terpengaruh dari bantuan dari dana APBN, DAK dan APBD satu, Hal ini Sedikit banyaknya berimbas Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang bisa di ukur dari Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Perkebunan dan Perikanan yang secara kasat mayra dilihat pada hasil produksi dan produktivitas di sektor pertanian dan perikanan. Program – Program Tersebut mencakup Prasarana dan Sarana Pertanian dan Prasarana dan Sarana Perikanan. Diharapkan beberapa tahun kedepan kabupaten balangan dapat menjadi daerah produsen utama dari sektor pertanian dan perikanan. Beberapa tahun terakhir kabupaten balangan mempunyai komoditas primadona baru di sektor ekport porang, Kabupaten balangan mempunyai sumber daya yang sangat menjanjikan dalam komoditas ini, yang mana pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan juga mendukung penuh dalam hal pengembangan komoditas primadona terbaru ini.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

5.1.1 Strategi

Sesuai Dengan Tujuan dan Sasaran, maka Strategi yang disusun menggunakan analisis faktor-faktor yang menjadi Kekuatan (Strenght), Kelemahan, (Weakness), Peluang (Opportunities) dan Ancaman (Threats)

1. Meningkatkan Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan

5.1.2 Kebijakan

Dalam Mencapai Pembangunan disektor Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yang telah tersusun dalam sasaran strategis, perlu dijabarkan dalam bentuk kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan luas panen, produksi dan produktivitas padi sawah dan komoditas tanaman pangan
2. Peningkatan produksi dan produktivitas hortikultura, peternakan, perikanan, perkebunan
3. peningkatan daya saing produk dan pemasaran hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan
4. Peningkatan prasarana sarana pertanian termasuk jaringan irigasi, waduk/embung dan tampungan air lainnya disertai upaya-upaya menjaga ketersediaan airnya

5.2 Analisis faktor-faktor pendorong dan penghambat

5.2.1 Kekuatan (Strenght)

Berdasarkan Identifikasi Tugas dan Fungsi Pelayanan, maka kekuatan yang dimiliki Oleh Dinas Ketahanan pangan, Pertanian dan Perikanan :

1. sudut pandang urgensi, pertanian adalah sektor penopang ketahanan pangan (food security) yang akan krusial di kala krisis ekonomi. Ini

bukan hanya sebatas bertahan hidup tapi juga masalah asupan gizi masyarakat

2. krisis membuka jendela kesempatan (window of opportunity) untuk merevitalisasi sektor pertanian
3. Potensi Sumber Daya Alam yang ada Senantiasa digali dan ditingkatkan pemanfaatannya, seperti hasil pertanian/perkebunan dan perikanan dengan tetap memperhatikan tingkat kontinuitas penyediaan bahan, serta SDM yang handal.
4. Berdasarkan data BPS Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Kabupaten pada tahun 2020 Kabupaten Balangan Mempunyai lapangan Pekerjaan Utama dari total 70928 sebanyak 38959 adalah dari sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
5. Total Kelompok Tani 2020 sebesar 1300 yang setiap tahunnya meningkat seiring meningkatnya tingkat minat Petani muda untuk Pengembangan sektor pertanian.

5.2.2 Kelemahan (Weakness)

Berdasarkan Identifikasi Tugas dan Fungsi Pelayanan, maka kelemahan yang dimiliki Oleh Dinas Ketahanan pangan, Pertanian dan Perikanan :

1. Minimnya Koordinasi dan Komunikasi antar Pihak Terkait dalam Pengembangan Sektor Pertanian dan Perikanan
2. Masih Minimnya SDM baik dalam Kuantitas maupun kualitas guna mendukung Peningkatan Produksi dan Produktivitas di Sektor Pertanian dan Perikanan
3. Perlunya peningkatan Sarana prasarana Penunjang Sektor Pertanian dan Perikanan
4. Perencanaan Program dan Kegiatan Bidang Ketahanan pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, Peternakan, Perkebunan, Perikanan, dan Prasarana sarana dan Penyuluhan Masih belum Efektif dan efisien

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DKPPP TAHUN 2021 – 2026

Dalam Upaya Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan maka penyusunan strategi dan kebijakan dinas menjadi sangat penting terutama dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun keterkaitan antara tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dari dinas Ketahanan pangan, Pertanian dan Perikanan kabupaten balangan dapat di lihat pada table T-C 26 berikut :

Tabel T-C. 26.			
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan			
VISI : MEMBANGUN DESA, MENATA KOTA MENUJU BALANGAN YANG LEBIH MAJU DAN SEJAHTERA			
MISI II : MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT BALANGAN BERBASIS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatkan Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan	Peningkatan luas panen, produksi dan produktivitas padi sawah dan komoditas tanaman pangan
			Peningkatan produksi dan produktivitas hortikultura, peternakan, perikanan, perkebunan
			peningkatan daya saing produk dan pemasaran hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan
			Peningkatan prasarana sarana pertanian termasuk jaringan irigasi, waduk/embung dan tampungan air

			lainnya disertai upaya-upaya menjaga ketersediaan airnya
--	--	--	--

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Rencana Program dan Kegiatan disusun mengacu pada Program yang tertuang dalam Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Balangan Tahun 2021- 2026, diambil dari strategi dan kebijakan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Balangan, yaitu :

IV. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan pengajuan verifikasi Keuangan SKPD

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- Pengadaan kendaraan Dinas Operasional Atau lapangan

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

V. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

1. Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian

- Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
- Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian

2. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota

- Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman
- Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
- Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman

3. Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil
- Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak

5. Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak
- Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak

VI. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

1. Pembangunan Prasarana Pertanian

- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian
- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya

2. Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota

- Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak

VII. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

4. Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota

- Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
- Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular

5. Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner

- Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan
- Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan

VIII. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

1. Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota

- Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan(OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
- Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

IX. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

1. Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian

- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
- Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani diKecamatan dan Desa

X. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN

1. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

- Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan
- Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya

XI. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

1. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan

- Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
- Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
- Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan
- Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan

3. Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota

- Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

4. Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi

- Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Lokal

5. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi

- Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun
- Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

XII. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

1. Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan

- Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan

2. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota

- koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota

XIII. PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

1. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

- Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

XIV. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

1. *Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota*

- Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan

XV. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

1. *Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil*

- Pengembangan Kapasitas Pembudi daya Ikan Kecil
- Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil
- Pemberian Pendampingan Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

2. *Pengelolaan Pembudidayaan Ikan*

- Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota
- Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota
- Pengeloan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budiyaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota

XVI. PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

1. *Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang dapat diusahakan dalam Kabupaten / Kota*

- Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/ Kota
- Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten / Kota

XVII. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

1. *Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil*

- Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skla Mikro dan Kecil

2. *Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota*

- Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota

Program kegiatan secara lengkap tersaji pada tabel T-C. 27 :

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DKPPP TAHUN 2021 - 2026

Tabel T-C.27.

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan Kabupaten Balangan

TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	IKU	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	In dilakor Kinerja Program /Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2020)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Rencana Peranglat Daerah (2026)	Unit Kerja Peringkat Daerah Penanggung jawab	
								Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
								TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)		
Meningkatnya Perumahaan	Kontribusi PDB Sektor Pertanian, Perkebunan dan Perikanan (%)	Meningkatnya Perumbuhan Perumbuhan dan Perikanan (%)	Kontribusi PDB Sektor Pertanian, Perkebunan dan Perikanan (%)	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				38.546.877.735		33.019.115.341	34.670.069.009	36.403.372.459	38.471.868.012	40.340.922.275	202.855.659.350							
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Ajusteabilitas Kinerja (Nilai SKADIP)	Dinas	53,07 (CC)	70	6.794.701.137	71 (BB)	8.110.742.341	72 (BB)	8.516.279.458	73 (BB)	8.942.093.451	74 (BB)	9.554.961.257	75 (BB)	10.172.092.006	75 (BB)	44.157.626.288	
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi perangkat daerah yang baik	Dinas	100%	100%	399.020.900	100%	452.430.000	100%	454.051.500	100%	476.754.075	100%	524.429.463	100%	576.872.451	100%	2.431.128.368	
				Penyusunan Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Yang Di buat Dan Diripkan (Dokumen)	Dinas	7 Dokumen	7	318.520.800	11 Dokumen	417.430.000	11 Dokumen	448.801.500	11 Dokumen	471.241.575	11 Dokumen	518.365.733	11 Dokumen	570.202.306	62 Dokumen	3.328.132.013	
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Honor yang Dibayarkan	Dinas	12 Bulan	4	57.200.000	4 Bulan											57.200.000	
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Yang Di buat Dan Diripkan	Dinas	4 Dokumen	4	22.300.000	4 Dokumen	5.000.000	4 Dokumen	5.250.000	4 Dokumen	5.512.500	4 Dokumen	6.063.750	4 Dokumen	6.670.125	24 Dokumen	45.798.375	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku	Dinas	100%	100%	5.236.655.372	100%	5.483.106.141	100%	5.737.263.548	100%	6.045.126.723	100%	6.348.317.981	100%	6.666.762.232	100%	30.054.125.918	
				Penyediaan Gap dan Tunjangan ASN	Persentase ASN yang terbayarkan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan	Dinas	100%	100%	5.205.835.372	100%	5.488.148.141	100%	5.739.453.548	100%	6.038.438.323	100%	6.327.749.741	100%	6.644.137.238	100%	28.943.628.214	
				Pelaksanaan Penatausahaan dan pengapahan verifikasi Keuangan SKPD	Persentase dokumen keuangan yang diverifikasi	Dinas	100%	100%	30.800.000	100%	16.960.000	100%	17.809.000	100%	18.698.400	100%	20.368.240	100%	21.623.064	100%	110.489.704	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Dinas	100%	100%	25.000.000	100%	185.800.000	100%	193.090.000	100%	204.844.500	100%	225.328.950	100%	247.861.845	100%	898.123.295	
				Pengadaan Pakan Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakan Harian Ternak Yang Tersedia	Dinas	260 stel	260 stel	-	440 Bush	110.800.000	440 Bush	118.340.000	440 Bush	122.157.000	440 Bush	134.372.700	440 Bush	147.809.970	2480 Bush	5206798.70	
				Sonbingun, Tabris, Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Simrek yang di lous	Dinas	15 Ok	5 Ok	25.000.000	15 OK	75.000.000	15 OK	78.750.000	15 OK	82.667.500	15 OK	90.956.250	15 OK	100.051.875	75 Ok	377.445.623	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan pelaksanaan administrasi umum	Dinas	100%	100%	672.400.000	100%	418.892.400	100%	439.837.020	100%	461.628.671	100%	508.011.758	100%	558.812.934	100%	2.820.769.483	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya instalasi listrik Penerangan Bangunan	Dinas	12 Bulan	4 Bulan	4.843.000	12 Bulan	13.179.400	12 Bulan	13.839.370	12 Bulan	14.530.288	12 Bulan	15.963.317	12 Bulan	17.581.649	72 Bulan	667.76.623	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Dinas	12 Bulan	4 Bulan	308.500.000	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan	388.378.900	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Dinas	12 Bulan	4 Bulan	33.295.000	12 Bulan	101.328.000	12 Bulan	106.804.400	12 Bulan	111.934.620	12 Bulan	123.118.082	12 Bulan	135.440.880	72 Bulan	510.402.992	
				Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas	12 Bulan	4 Bulan	16.000.000	12 Bulan	5.040.000	12 Bulan	5.292.000	12 Bulan	5.558.600	12 Bulan	6.112.260	12 Bulan	6.723.466	72 Bulan	36.684.346	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terkoordinasinya rapat-rapat dan konsultasi keluar daerah	Dinas	12 Bulan	4 Bulan	408.762.000	12 Bulan	399.145.000	12 Bulan	314.102.330	12 Bulan	339.807.363	12 Bulan	362.788.699	12 Bulan	389.086.909	72 Bulan	1.813.528.820	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemerintah Daerah	Dinas	100%	100%	240.000.000	100%	682.523.800	100%	716.648.990	100%	752.482.490	100%	827.730.738	100%	910.503.812	100%	3.447.367.030	
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainya	Tersedianya alat tulis kantor	Dinas	12 Bulan	12 Bulan	-	12 Bulan	682.523.800	12 Bulan	716.648.990	12 Bulan	752.482.490	12 Bulan	827.730.738	12 Bulan	910.503.812	72 Bulan	3.207.367.030	
					Tersedianya alat tulis kantor	Dinas	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan	72 Bulan	
					Tersedianya Meja dan Kursi	Dinas	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan	72 Bulan	
					Tersedianya Gaji Pegawai	Dinas	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan	72 Bulan	
					Terpeliharanya alat dan perlengkapan Kantor	Dinas	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan	72 Bulan	
					Tersedianya Alat dan Peralatan Kantor	Dinas	12 Bulan	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan	72 Bulan	
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atas Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Yang Di Beli	Dinas	3 Unit	8 Unit	240.000.000	12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan	8 Unit	240.000.000

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DKPPP TAHUN 2021 – 2026

	Penyediaan Jasa Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Penyediaan Jasa Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas	12 Bulan	4 Bulan	142.314.865	12 Bulan	474.300.000	12 Bulan	498.015.000	12 Bulan	522.915.750	12 Bulan	575.207.325	12 Bulan	632.728.058	72 Bulan	2.388.780.998
	Penyediaan Jasa Survei Menyurat	Tersedianya Kebutuhan akan Surat Menyurat	Dinas	12 Bulan	4 Bulan	3900.000	12 Bulan	12.300.000	12 Bulan	12.915.000	12 Bulan	13.560.750	12 Bulan	14.916.825	12 Bulan	16.408.508	72 Bulan	61.701.083
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas	12 Bulan	4 Bulan	138.414.865	12 Bulan	462.000.000	12 Bulan	485.100.000	12 Bulan	509.355.000	12 Bulan	560.280.500	12 Bulan	616.319.550	72 Bulan	2.309.479.915
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Petugas Administrasi Yang Terbayarkan	Dinas		4 Bulan	17.600.000										4 Bulan	17.600.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah	Waktu Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemungut Urusan Pemerintahan Daerah	Dinas	12 Bulan	4 Bulan	79.310.000	12 Bulan	433.688.000	12 Bulan	455.372.400	12 Bulan	478.141.020	12 Bulan	525.955.122	12 Bulan	578.550.634	72 Bulan	2.117.329.176
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional di area Lapangan	Tersedianya Bahan Bakar dan Pelumas	Dinas	12 Bulan	4 Bulan	69.310.000	12 Bulan	433.688.000	12 Bulan	455.372.400	12 Bulan	478.141.020	12 Bulan	525.955.122	12 Bulan	578.550.634	72 Bulan	2.107.329.176
		Jumlah Gaji yang terbayar	Dinas	12 Bulan	4 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		72 Bulan	
		Terpeenuhnya Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Dinas		4 Bulan				12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		72 Bulan	
		Terpeenuhnya Kendaraan Dinas	Dinas	12 Bulan	4 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		12 Bulan		72 Bulan	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah mesin Yang Terpelihara	Dinas	12 Bulan	4 Bulan	10.000.000											10.000.000	
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Produktivitas Perkebunan (Karet)	Kabupaten Balangan	1000 Kg/Ha	10,00%	20.486.554.920	12,00%	16.369.904.650	14,00%	17.188.399.883	16,00%	18.047.819.877	18,00%	18.950.210.870	20,00%	19.897.721.414	20,00%	110.940.611.614
		Persentase Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan (Ton/Ha)	Kabupaten Balangan	4,37 Ton/Ha	15,00%		16,00%		17,00%		18,00%		19,00%		20,00%		20,00%	
		Persentase Peningkatan Produksi Hortikultura	Kabupaten Balangan	8,8 Ton/Ha	15,00%		16,00%		17,00%		18,00%		19,00%		20,00%		20,00%	
		Persentase Peningkatan SDM Terampil Pengolah Produk Unggulan TPH	Kabupaten Balangan	140 Orang	50%		51,00%		52,00%		53,00%		54,00%		55,00%		315,00%	
		Persentase Peningkatan Produksi Daging	Kabupaten Balangan	1.933.289Kg	3,50%		3,50%		3,50%		3,50%		3,50%		3,50%		21,00%	
		Persentase Peningkatan Kelahiran Ternak Hasil IB	Kabupaten Balangan	140 ekor	6,00%		6,00%		6,00%		6,00%		6,00%		6,00%		36,00%	
		Persentase Peningkatan sarana Pertanian	Kabupaten Balangan	2824 unit	25%		25,0%		25%		25%		25%		25%		150%	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Jumlah Peningkatan Luas Indeks Pertanian	Kabupaten Balangan	200 Ha	12.837.232.920	225 Ha	9.076.619.700	250 Ha	9.267.950.685	275 Ha	9.744.473.219	300 Ha	10.816.529.547	325 Ha	9.850.671.959	325 Ha	52.516.858.330	
		Jumlah Peningkatan Penggunaan Pupuk Berimbang Pada Indeks Pertanian	Kabupaten Balangan	125 Ha		125 Ha		125 Ha		125 Ha		125 Ha		125 Ha		750 Ha		
		Jumlah Sarana Pertanian Yang Diserahkan Kepada Masyarakat	Kabupaten Balangan	148 Paket		148		148		148		148		148		888 Paket		
		Jumlah Demplot Sarana Penyuluhan dalam budidaya tanaman Hortikultura	Kabupaten Balangan					4 unit		4 unit		4 unit		4 unit		16 Unit		
		Jumlah Benih/Bibit dan Sarana Produksi Hortikultura	Kabupaten Balangan	9 Paket		9 Paket		9 Paket		9 Paket		9 Paket		9 Paket		54 Paket		
		Jumlah UPIB dan Kel. Terampil penerima bantuan Sarana Pertanian	Kab. Balangan	388 Kel	27	82		82		82		82		82		437		
		Jumlah Luas Rehabilitasi dan Pemenuhan Tanaman Perkebunan	Kab. Balangan	118 Ha	189	100		175		175		125		125		889		
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Pengadaan Pupuk NPK	Kabupaten Balangan	0	38.500.000	13900 Kg	371.778.700	13900 Kg	390.367.655	13900 Kg	409.886.017	13900 Kg	450.874.618,43	13900 Kg	485.962.080	66500 Kg	1.785.590.350	
		Pengadaan Pestisida	Kabupaten Balangan	0		2000 liter		2000 Liter		2000 Liter		2000 Liter		2000 Liter		10000 Liter		
		Pendampingan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kabupaten	Kabupaten Balangan			150 Orang										150 Orang		
		Pendampingan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Kecamatan	Kabupaten Balangan			200 Orang										200 Orang		
		Jumlah Sarana Produksi pertanian yang tersedia		12 Ha	12 Ha											12 Ha		

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DKPPP TAHUN 2021 – 2026

	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengadaan Pestisida (Kg)	Kabupaten Balangan	1500 Kg/Liter	793	12.796.732,920	39000	8.704.841,000	39510	8.877.583,050	39510	9.334.987.202,50	39510	10.965.654.929	39510	9.354.709.878,63	193833 Kg	50.731.267,960
		Jumlah Pengadaan Hano sprayer	Kabupaten Balangan	760 Buah	420		179 Buah		179 Buah		179 Buah		179 Buah		179 Buah		895 Buah	
		Jumlah Pengadaan Hano sprayer elektrik	Kabupaten Balangan	1930 Buah	650		650		2000		1000		750		750		5800 Buah	
		Jumlah Hand Traktor Rotary yang tersedia	Kabupaten Balangan	4 Buah	12		10 Buah		10 Buah		10 Buah		10 Buah		10 Buah		62 Buah	
		Jumlah Pompa Air yang tersedia	Kabupaten Balangan	0			5		5		5		5		5		25 Buah	
		Jumlah Pupuk Yang tersedia (Kg)	Kabupaten Balangan	58500 Kg	45025		200000		1975500		1975500		1975500		1975500		8147025 Kg	
		Jumlah Combine harvester	Kabupaten Balangan		1		2		3		4		5		6		21 Buah	
		Jumlah Rice Transplanter	Kabupaten Balangan		5		5		5		5		5		5		30 Buah	
		Jumlah Power Thraser	Kabupaten Balangan	20 Unit	10		10		10		10		10		10		60 Unit	
		Jumlah traktor	Kabupaten Balangan		1		1		2		2		3		4		13 Unit	
		Jumlah cultivator	Kabupaten Balangan	11 Unit	3		4		4		4		4		4		23 Unit	
		Jumlah Springkler dan Kengkapannya	Kabupaten Balangan		1 Paket		3		3		3		3		3		16 Paket	
		Jumlah Penangkatan Indeks Perenanan	Kabupaten Balangan				100 Ha		100 Ha		100 Ha		100 Ha		100 Ha		500 Ha	
		Jumlah Penggunaan pupuk berimbang Tanaman Pangan	Kabupaten Balangan				60 Ha		65		70		75		80		350 Ha	
		Jumlah Kegiatan Hari Lapangan Tani dalam rangka Panen Raya dan Tanam Perdana	Kabupaten Balangan				4 Kali		4 kali		5 Kali		5 kali		5 kali		23 kali	
		Jumlah Kecamatan Penyusunan Calon Petani Calon Lokasi	Kabupaten Balangan				8 Kecamatan		8 Kecamatan		8 Kecamatan		8 Kecamatan		8 Kecamatan		8 Kecamatan	
		Jumlah peserta Kegiatan Penyampaian Informasi tentang program tanaman pangan	Kabupaten Balangan				150 Orang		150 Orang		150 Orang		150 Orang		150 Orang		150 Orang	
		Jumlah Pengambilan sampel ubinan	Kabupaten Balangan				120 Sampel Ubinan		120 Sampel Ubinan		128 Sampel Ubinan		128 Sampel Ubinan		136 Sampel Ubinan		632 sampel ubinan	
		Jumlah Pelatihan Budidaya Tanaman Pangan yang bernilai ekonomi tinggi	Kabupaten Balangan	0	150 Orang		8 Kecamatan		8 Kecamatan		8 Kecamatan						8 Kecamatan	
		Jumlah Demostrasi Plot Budidaya Porang	Kabupaten Balangan				1 Unit		1 Unit		1 Ha		1 Unit		1 Unit		5 Unit	
		Jumlah Demplot Sarana Penyuluhan dalam budidaya tanaman Hortikultura	Kabupaten Balangan						4 unit		4 unit		4 unit		4 unit		16 Unit	
		Jumlah Benih/Bibit dan Sema Produk Hortikultura	Kabupaten Balangan		9 Paket		9 Paket		9 Paket		9 Paket		9 Paket		9 Paket		54 Paket	
		Jumlah Kelompok yang Mendapatkan Sosialisasi dan Monitoring Tanaman Hortikultura	Kabupaten Balangan		12 Kelompok Tani		12 Kelompok Tani		12 Kelompok Tani		12 Kelompok Tani		12 Kelompok Tani		12 Kelompok Tani		72 Kelompok Tani	
		Jumlah Lusa Rehabilitasi dan Penanaman Tanaman Perkebunan	Kabupaten Balangan	118 Ha	189		100		175		175		125		125		889	
		Jumlah Asap Cair u/ Pembeku / Pengumpul Lateks	Kabupaten Balangan	30.505 kg/liter	0		10.000 liter		10.000 liter		10.000 liter		10.000 liter		10.000 liter		80.505 liter	
		Jumlah Kelompok Penerima Alat Pasca Panen Perkebunan	Kabupaten Balangan	85 Kelompok	0		5 Kelompok		5 Kelompok		5 Kelompok		5 Kelompok		5 Kelompok		108 Kelompok	
		Jumlah Alat Uji Kadar Karet Kering	Dinas	0	0		2 buah		-		2 buah		2 buah		2 buah		6 Buah	
		Jumlah Pembuatan Papan Nansa LFFE	Kabupaten Balangan	0 buah	24 buah		10 buah		5 buah		5 buah		5 buah		5 buah		54 Buah	
		Jumlah Cadangan Benih Daerah (Ha)					2000		2000		2000		2000		2000		10000	
		Jumlah Sarana Produksi pertanian yang tersedia	Kabupaten Balangan	30	10												10	

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DKPPP TAHUN 2021 – 2026

Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewani, Tumbuhan, dan Mikro Organisme	Jumlah Chip Porang Kualitas Ekspor	Kabupaten Balangan	1 Ton	3.568.412.000	1 Ton	1.501.903.650	1 Ton	1.839.498.833	1 Ton	1.918.348.274	1 Ton	2.110.183.652	1 Ton	2.321.202.017	6 Ton	11.757.645.275		
	Jumlah buah kelas tinggi yang dihasilkan	Kabupaten Balangan	2500 Kg		2500 Kg		2500 Kg		2500 Kg		2500 Kg		2500 Kg		12500 Kg			
	Jumlah Pelemban pengolahan hasil tanaman pangan dan hortikultura (Pasca Panen)	Kabupaten Balangan	140 Orang	70	140		210		280		350		420		1470			
	Jumlah Pameran Produk Unggulan Tanaman Pangan dan Hortikultura	Kabupaten Balangan	7 kali	5 kali	5 kali		5 kali		5 kali		5 kali		5 kali		30 kali			
	Jumlah kontes buah Durian dan Buah lengkalo lainnya	Kabupaten Balangan	1 kali	1 kali	1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		6 kali			
	Jumlah Luas Pemaakoran Pemasakan Pangan dan Hortikultura	Kabupaten Balangan	25 Hektare	50 Hektare	50 Hektare		50 Hektare		50 Hektare		50 Hektare		50 Hektare		50 Hektare			
	Jumlah Kebun Koleksi dan Birus yang terpelihara	Kabupaten Balangan	12 Ha	12 Ha	12 Ha		12 Ha		12 Ha		12 Ha		12 Ha		12 Ha			
	Jumlah event promosi Hasil Produksi Perkebunan Unggul Daerah yang diikuti	Kabupaten, Provinsi dan Nasional	73 kegt	0			10 kegiatan		10 kegiatan		10 kegiatan		10 kegiatan		113 Kegiatan			
Penjaminan Kemandirian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Benih Padi (untuk Pengantar)	Kabupaten Balangan	5000 Kg	5000 kg	2.929.961.000	1100 Kg	739.955.650		1200 Kg	770.653.433	1250 Kg		1300 Kg	890.104.714,54	1300 Kg	979.115.186		
	Jumlah Pertemuan / Rapat Jalur Alur Benih	Kabupaten Balangan	250 Orang	250 Orang		300 Orang		400 Orang	500 Orang		550 Orang		600 Orang		2600 Orang			
	Jumlah Benih Padi Kelas ER	Kabupaten Balangan	0	20000 Kg		20000 Kg		20000 Kg	20000 Kg		20000 Kg		20000 Kg		120000 Kg			
	Jumlah tanaman Varietas baru yang dikembangkan	Kabupaten Balangan	3 Varietas			3 Varietas		1 Varietas	1 Varietas		1 Varietas		1 Varietas		10 Varietas			
	Jumlah buah kelas tinggi yang dihasilkan	Kabupaten Balangan	2500 KG			2500 KG		2500 KG	2500 KG		2500 KG		2500 KG		15000 KG			
	Jumlah Pengantar Tanaman Pangan dan Hortikultura	Kabupaten Balangan	4 Kelompok			4 Kelompok		4 Kelompok	4 Kelompok		4 Kelompok		4 Kelompok		24 Kelompok			
	Jumlah Kebun Koleksi dan Birus yang terpelihara	Kabupaten Balangan	12			12 Ha		12 Ha	12 Ha		12 Ha		12 Ha		12 Ha			
	Jumlah ketersediaan lahan penangkaran benih yang bersertifikat	Kabupaten Balangan	88	20											20			
	Jumlah Benih Padi Inbriida			22100		8336		164625	164625		164625		164625		688996 Kg			
	Jumlah Benih Jagung Hibrida					900		75000	75000		75000		75000		300900 Kg			
Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah event promosi Hasil Produksi Perkebunan Unggul Daerah yang diikuti	Kabupaten Balangan	73 kegt					10 kegiatan	26.250.000,00		10 kegiatan	262.500.000,00	10 kegiatan	288.750.000,00	10 kegiatan	317.625.000,00	40 Kegiatan	1.131.375.000
Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah produk unggulan yang di Promosikan	Kabupaten Balangan	4 produk	4 produk	638.051.000		767.948.000		806.345.400		846.662.670		931.328.937,00		1.024.461.831		24 produk	4.247.848.838
	Jumlah Kegiatan pasca Panen Yang dilaksanakan	Kabupaten Balangan	3kali	3kali		3kali		3kali	3kali		3kali		3kali		15 kali			
	Pelatihan pengolahan chip porang	Kabupaten Balangan	59	11		11		11	11		11		11		66 Kegiatan			
	Jumlah Pengadaan Mesin Pengering Porang	Kabupaten Balangan	0	0		4 Unit		4 Unit	4 Unit		4 Unit		4 Unit		20 Unit			
	Jumlah Pengadaan Mesin Pemotong Porang	Kabupaten Balangan	0	0		1 Unit		1 Unit	1 Unit		1 Unit		1 Unit		5 Unit			
	Jumlah Pengadaan Mesin Pencuci Porang	Kabupaten Balangan	0	0		7 Unit		7 Unit	7 Unit		7 Unit		7 Unit		35 Unit			
	Jumlah Pengadaan Mesin Pencuci Porang	Kabupaten Balangan	0	0		5 Unit		5 Unit	5 Unit		5 Unit		5 Unit		25 Unit			
Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan IB di 4 Kecamatan (Hidong, Jind, Peringin, dan Peringin Selatan)	Kabupaten Balangan	4		60.565.000	4	148.938.000	4	156.384.900	4	164.204.145	4	180.624.560	4	19.8687.015	24 Kecamatan	909.403.620	
Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Ketersediaan Straw dan N2 Cair	Kabupaten Balangan	1 Paket	1Paket	60.565.000	1Paket	148.938.000	1Paket	156.384.900	1Paket	164.204.145	1Paket	180.624.560,50	1Paket	19.687.015	6 Paket	909.403.620	
Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pevebaran Ternak yang diserahkan Kepada Masyarakat	Kabupaten Balangan	4115	5.635.184.000		5.642.443.300		5.924.565.465		6.220.793.738		6.842.873.112		7.527.160.423		30.535.737.739		
Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	Jumlah Ternak Besar Yang didistribusikan	Kab. Balangan	213	243	3.949.895.000	200	5.000.300.900	200	5.250.315.945	200	5.512.831.742	200	6.064.114.916,48	200	6.670.526.408	1043	27.447.684.012	
	Jumlah Ternak Kecil Yang didistribusikan	Kabupaten Balangan	100	249		200		200	200		200		200		1049			
	Jumlah Ternak Unggas Yang didistribusikan	Kabupaten Balangan	3802	4025		200000		200000	200000		200000		200000		1004025			
	Jumlah aneka Ternak yang didistribusikan	Kabupaten Balangan	0		500		500		500		500		500		370			
Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Luas kebun hijauan makanan ternak	Sentra pembibitan peternakan	6 ha	6 ha	70.450.000	8 Ha	642.142.400	8 Ha	674.249.520	8 Ha	707.961.996	8 Ha	778.758.195,60	8 Ha	856.634.015	8 Ha	3.088.053.727	
	Jumlah Kelahiran dan Ternak yang terpelihara Di Sentra pembibitan Peternakan	Sentra pembibitan peternakan	22 ekor	5 ekor		5 ekor		5 ekor	5 ekor		5 ekor		5 ekor		30 Ekor			
	Jumlah Vaksin dan Obat-obatan Yang Tersedia (Paket)	Sentra pembibitan peternakan	8			1		1	1		1		1		5 paket			

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DKPPP TAHUN 2021 - 2026

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Prasarana Pertanian	Kabupaten Balangan	46 Bush	20%	10.735.89.1.678	20,0%	5.793.946.960	20%	6.083.644.308	20,0%	6.387.826.523	20%	6.707.217.850	20,0%	7.042.578.742	120,0%	32.067.606.002
Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian yang Terpenuhi	Kabupaten Balangan	124	45	10.735.89.1.678	10%	4.713.533.460	18 Pekerjaan	4.949.210.133	10%	5.196.670.640	10%	5.456.504.172	10%	5.729.329.380	60%	32.067.606.002
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi pertanian	Kabupaten Balangan	279 M2	458 M2	888.011820	10000 M2	1.000.000.000	10000 M2	1.050.000.000	10000 M2	1.102.500.000	10000 M2	1.212.750.000,00	10000 M2	1.394.025.000	50458 M2	5.587.286.820
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi pertanian	Kabupaten Balangan	5760 M3	5760 M3	600.000.000	3840 M3	73930.000	3840 M3	77.626.500	3840 M3	81.507.825	3840 M3	89.658.607,50	3840 M3	96.624.468	24960 M3	947.417.401
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Produksi/Jalan Usaha Tani	Kabupaten Balangan	2697 M2	2755 M2	7.494.199.858	10000 M2	2.566.253.460	14000 M2	1.962.066.139	14000 M2	2.061.169.440	14000 M2	2.029.452.851,62	14000 M2	1.989.572.928	68755 M2	15.546.421.210
Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Pembangunan/Rehabilitasi Pertanian	Kabupaten Balangan	3 Unit	3 Unit	1.753.720.000	3 Unit	1.073.350.000	2 Unit	1.839.517.500	2 Unit	1.931.493.375	2 Unit	2.124.642.712,50	2 Unit	2.337.106.984	14 Unit	9.986.480.571
	Jumlah bangunan gudang bokar yang dibangun	Kabupaten Balangan	138 Unit	0		5 unit		10 unit		10 unit		10 unit		10 unit		183 Unit	
	Jumlah Prasarana Tanaman Hortikultura (Paket)	Kabupaten Balangan	0	0		0		1		1		1		1		4 paket	
Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Peningkatan Prasarana dan Sarana Peternakan terfasilitasi	Kabupaten Balangan	18	24	3.187.296.000	12	1.080.413.500	12	1.194.434.175	12	1.191.155.884	12	1.250.713.678	12	1.313.249.362	84	9.157.262.599
Pelestarian dan Pemantauan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Prasarana dan Sarana Peternakan terfasilitasi	Kabupaten Balangan	18	24	3.187.296.000	12	1.080.413.500	12	1.194.434.175	12	1.191.155.884	12	1.250.713.678	12	1.313.249.362	84	9.157.262.599
PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESIHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Pemunahan Kejadian Hewan Menular	Kabupaten Balangan	99	10	58.660.000	10	400.023.090	10	420.024.245	10	441.025.457	10	463.076.730	10	486.230.566	10	2.269.040.888
Penjagaan Kesehatan Hewan, Pemunahan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan	Jumlah Pelayanan Vaksinasi Pengobatan Ternak	Kabupaten Balangan	525 ekor	525 ekor	23.470.000	550 Ekor	218.606.900	550 Ekor	229.537.245	550 Ekor	241.014.107	550 Ekor	243.064.246	550 Ekor	244.216.834	3700 Ekor	1.199.909.332
Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Pelayanan Vaksinasi Pengobatan Ternak	Kabupaten Balangan	400 ekor	280 ekor	6.750.000	400 ekor	102.299.300	400 ekor	107.414.265	400 ekor	112.784.978	400 ekor	102.012.204,08	400 ekor	89.059.587	2400 Ekor	520.320.335
	Jumlah obat-obatan dan vaksinasi ternak yang tersedia	Kabupaten Balangan	12 bulan	4 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		72 Bulan	
Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Pelayanan Vaksinasi Pengobatan Ternak	Kabupaten Balangan	125	125 ekor	16.720.000	150 ekor	116.307.600	150 ekor	122.122.980	150 ekor	128.229.129	150 ekor	141.052.041,90	150 ekor	155.157.246	900 Ekor	679.588.997
	Jumlah obat-obatan dan vaksinasi ternak yang tersedia	UPFD Pukeswan dan Perbitatan	12 bulan	4 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		12 bulan		72 bulan	
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Kelompok Usaha Peternakan yang Dibina	Kabupaten Balangan	8 Kegiatan	8 Kegiatan	3.600.000	16 Kegiatan	108.758.290	15 Kegiatan	114.196.205	15 Kegiatan	119.906.015	15 Kegiatan	131.896.616	15 Kegiatan	145.086.278	84 Kegiatan	1.310.063.903
Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah penerapan peternakan yang diikuti	Kabupaten Balangan	3	0	10.590.000	2	135.212.100	2	135.212.100	2	135.212.100	2	135.212.100	2	135.212.100	10	686.620.500
Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pelatihan Pengolahan Hasil Peternakan	Kabupaten Balangan	2 KWT	5 KWT	3.600.000	5 KWT	108.758.290	5 KWT	114.196.205	5 KWT	119.906.015	5 KWT	131.896.616,20	5 KWT	145.086.278	30 KWT	623.443.409
	Jumlah Pertemuan Asuransi Usaha Ternak Sapi	Kabupaten Balangan	1 Kelompok	3 Kelompok		3 Kelompok		3 Kelompok		3 Kelompok		3 Kelompok		3 Kelompok		18 Kelompok	
	Jumlah Kegiatan Pasar Murah	Kabupaten Balangan	0	7 Kegiatan		7 Kegiatan		7 Kegiatan		7 Kegiatan		7 Kegiatan		7 Kegiatan		35 Kegiatan	
	Jumlah Rehabilitasi Kandang Kemitina Rumah Potong Hewan	Kabupaten Balangan	0	1 paket												1 Paket	
Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Jumlah Peternak yang mengikuti Penyuluhan KIE Peternakan	Kabupaten Balangan	100 orang	100 orang	21.030.000	100 orang	72.657.900	100 orang	76.290.795	100 orang	80.105.335	100 orang	88.115.868	100 orang	96.927.455	600 Orang	435.127.353
Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan	Jumlah Peternak yang mengikuti Penyuluhan KIE Peternakan	Kabupaten Balangan	100 orang	100 orang	21.030.000	100 orang	72.657.900	100 orang	76.290.795	100 orang	80.105.335	100 orang	88.115.868,23	100 orang	96.927.455	600 Orang	435.127.353
PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCA PERTANIAN	Persentase Peningkatan Pengendalian terhadap serangan OPT Perkebunan	Kabupaten Balangan	1000 Ha	3%	108.690.000	8%	488.103.100	13%	512.50.8.255	18%	538.133.668	23%	565.040.351	30%	593.292.369	30%	2.805.767.743
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten / Kota	Persentase Peningkatan Pengendalian terhadap serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura	Kabupaten Balangan	4000 Ha	5%	108.690.000	6%	488.103.100	7%	512.50.8.255	8%	538.133.668	9%	565.040.351	10%	593.292.369	1000 Ha	2.805.767.743
	Jumlah serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura	Kabupaten Balangan	0	2000 Hektare	488.103.100	2000 Hektare	488.103.100	2000 Hektare	512.50.8.255	2000 Hektare	538.133.668	2000 Hektare	565.040.351	2000 Hektare	593.292.369	10000 Ha	2.805.767.743
	Jumlah Peningkatan Pengendalian terhadap serangan OPT Tanaman Pangan dan Hortikultura	Kabupaten Balangan	50 Ha	50 Ha		50 Ha		50 Ha		50 Ha		50 Ha		50 Ha		300 Ha	
	Jumlah Pengendalian Terhadap Serangan OPT Perkebunan (HA)	Kabupaten Balangan	50	100		100		100		100		100		100		550	
	Jumlah Peserta Bimtek Pengendalian Penanganan Kelorokoron Lahan Kebun (Gareng)	Kabupaten Balangan	0	50		50		50		50		50		50		250	

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DKPPP TAHUN 2021 – 2026

	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Peserta Sekolah Lapang, Bimtek Pembuatan Pengendali OPT	Kabupaten Balangan	200 Orang	106.690.000	200 Orang	488.103.100	200 Orang	512.508.255	200 Orang	538.133.668	200 Orang	565.040.351.000	200 Orang	593.292.369	1200 Orang	2.805.767.743	
		Jumlah Pelembun yang Menerima Bantuan Pengendalian OPT Perkebunan	Kabupaten Balangan	100 Orang		100 Orang		100 Orang		100 Orang		100 Orang		100 Orang		600 Orang		
		Jumlah Petani Mengikuti SLPHT Tanaman pangan dan Hortikultura	Kabupaten Balangan	100 Orang	45 Orang	150 Orang		150 Orang		150 Orang		150 Orang		150 Orang		795 Orang		
		Jumlah Peserta Bimtek Dan Sosialisasi Pengendalian Pengamanan Kekarifan Lahan Kebun (Orang)		0		50		50		50		50		50		250		
		Jumlah Sarana Pengendalian OPT Utama TPH (Kg)				1000		1000		1000		1000		1000		5000		
	Peningkatan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	PPDF		2	1											3		
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani	Kab. Balangan	220 Pokok	100,0%	362.380.000	100%	1.856.393.200	100,0%	1.949.212.860	100,0%	2.046.673.503	100,0%	2.251.340.853	100,0%	2.149.007.178	100,0%	10.615.007.594
		Persentase Peningkatan Petani peserta Pelatihan Pengolahan dan Pemasaran Baku yang memperoleh Sertifikat	Kab. Balangan	4400	9,00%		20,3%	31,6%	42,9%	54,2%	65,5%	65,5%						
	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Jumlah Petani yang mengikuti Pelatihan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan	Kabupaten Balangan	4400	400	362.380.000	1.856.393.200	500 org	500 org	500 org	500 org	500 org	500 org	2.251.340.853,30	2.149.007.178	2.900 Orang	8.758.614.395	
		Jumlah Peningkatan Kelas Kelompok Tani	Kabupaten Balangan	220	220	31.680.000	510.933.800	220	220	220	220	220	220	220	220	1320		
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Penyuluh yang mengikuti Bimtek/Pelatihan dan Penyuluh yang Lulus Uji Kompetensi	Kabupaten Balangan				10 Kegiatan	10 Orang	536.480.480	10 Orang	563.304.515	10 Orang	619.634.965,95	10 Orang	619.634.966	50 Kegiatan	2.370.734.936	
		Jumlah Bimtek/Pelatihan yang Terlaksana	Kabupaten Balangan				10 Kegiatan	10 Kegiatan		10 Kegiatan		10 Kegiatan		10 Kegiatan		50 Kegiatan		
		Jumlah dokumen Program Penyuluh WKP, BFP dan Kabupaten	Kabupaten Balangan	684 Eks	9 Eks		9 Eks	9 Eks		9 Eks		9 Eks		9 Eks		54 Eks		
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Kelompok Petanian yang meningkat kelasnya (kelompok)	Kabupaten Balangan	380	70	31.780.000	595.058.200	70	624.811.110	70	656.051.666	70	721.658.32,05	70	619.323.157	420	2.653.622.765	
		Jumlah Peserta Pelatihan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (950 org)	Kab. Balangan	4400 Orang	400 Orang		400 org	400 org	400 org	400 org	400 org	400 org	400 org	400 org	400 org	2400 Orang		
		Jumlah Peserta Sekolah Lapang	Kab. Balangan	0	0		50 org	50 org	50 org	50 org	50 org	50 org	50 org	50 org	50 org	250 Org		
		Jumlah Peserta Rapat Teknis UPP	Kab. Balangan	0	0		50 org	50 org	50 org	50 org	50 org	50 org	50 org	50 org	50 org	300 Org		
	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Kab. Balangan	12 Orang	87 Orang	296.920.000	750.401.200	98 Orang	787.921.260	98 Orang	827.317.323	98 Orang	910.049.055,30	85 Orang	910.049.055	85 Orang	3.734.256.694	
	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase cadangan pangan masyarakat	Kabupaten Balangan	10	10	1.199.591.000	2977.800.000	10	3037.35600	10	309810400	10	316006700	10	322326912	60	2.451.470.612	
	Penyediaan Infrastruktur dan Sarana Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan infrastruktur lumbung pangan dan rumah produksi pangan sumber daya pendukung etahanan pangan	Kabupaten Balangan	57	8	1.199.591.000	2977.800.000	9	3037.35600	9	309810400	9	316006700	9	322326912	53	2.451.470.612	
	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan Masyarakat yang dibangun	Jumlah Lumbung Pangan Masyarakat yang dibangun	Kabupaten Balangan	25	3	1.150.000.000	147790000	2	150745800	2	153760800	2	156836100	2	159972900	13	1.771.915.600	
		Jumlah RPK yang dibangun	Kabupaten Balangan	30	5		2	2	2	2	2	2	2	2	2	15		
		Jumlah Sosialisasi Pemahaman LPM dan RPK	Kabupaten Balangan				3	3	3	3	3	3	3	3	3	15		
	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Sarana pendukung kemandirian pangan (Paket)	Kabupaten Balangan	2,00		49.591.000	149990000	2	152989800	2	156049600	2	159170600	2	162354012	10	680.155.012	
	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase cadangan pangan pemerintah daerah	Kabupaten Balangan	87	87,3	1.080.455.000	87,4	9.197.39.800	87,5	7.115.54.988	87,6	724.586.196	87,7	731.769.900,00	87,8	753.452.724	87,8	4.001.818.808
	Penyediaan dan Penyuluhan Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah Dokumen Laporan Penyediaan Pangan Pokok atau Pangan Lainnya	Kabupaten Balangan	77	17	53.015.000	300.679.900	25	234.313.992	25	239.009.376	25	237.672.300,00	25	250.673.060	142	1.014.674.728	
	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Jumlah Dokumen Laporan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Kabupaten Balangan	65,00	13	11.440.000	102.900.000	13	104.958.000	13	107.057.160	13	103.090.100,00	13	113.399.110	78	439.944.370	
	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah kegiatan lomba cipta menu pangan lokal yang terlaksana	Kabupaten Balangan	9	1	90.000.000	100.000.200	2	29.620.800	2	30.213.216	2	30.817.500,00	2	31.433.850	11	152.085.366	
	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Jumlah laporan Terpentanya perkembangan harga pangan pokok Kabupaten (laporan)	Kabupaten Balangan	12,00	4	11.575.000	46.532.300	12	47.462.946	12	48.412.300	12	49.380.600,00	12	50.368.300	64	207.199.146	
		Jumlah Operasi Pasar dan Pasar Murah yang Terlaksana	Kabupaten Balangan	25,00	1		5	5	5	5	5	5	5	5	5	11	-	

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DKPPP TAHUN 2021 – 2026

	Pengembangan Kelenbagan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelompok PUM yang Dibina	Kabupaten Balangan	20	0	4	51.247.400	4	52.272.246	4	53.317.700	4	54.384.100,00	4	55.471.800	20	215.445.846		
	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan (ton)	Kabupaten Balangan	60		65	137.050.000	70	139.791.000	80	142.586.820	90	145.438.600,00	100	148.347.400	405	676.163.820		
	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan (ton)	Kabupaten Balangan	60		65	100.000.000	70	139.791.000	80	142.586.820	90	145.438.600,00	100	148.347.400	405	676.163.820		
	Renungan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Hितapak oleh Masyarakat Desa dan Kecamatan Desa	Jumlah Petugas enumerator	Kabupaten Balangan	9	9	9	47.520.000	9	172.009.800	9	175.449.996	9	182.538.200,00	9	186.188.964	54	770.656.160		
	Kordinasi dan sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Lokal	Jumlah Petugas enumerator	Kabupaten Balangan	9	9	9	47.520.000	9	172.009.800	9	175.449.996	9	182.538.200,00	9	186.188.964	54	770.656.160		
	Belaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Jumlah Laporan konsumsi energi dan Protein	Kabupaten Balangan	13	1	13	879.920.000	13	310.000.100	13	162.000.000	13	164.040.000	13	166.120.800,00	13	168.243.300	66	1.540.324.100
	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Jumlah Laporan konsumsi energi dan Protein	Kabupaten Balangan	1	1	1	5.280.000	1	60.000.100	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000,00	1	60.000.000	6	245.280.000
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengabdian dan Konsultasi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah kelompok pemberdayaan pangan masyarakat	Kabupaten Balangan	12		12	874.640.000	12	250.000.000	12	102.000.000	12	104.040.000	12	106.120.800,00	12	108.243.300	60	1.295.044.100
	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase penurunan daerah rentan pangan (%)	Kabupaten Balangan	5	5	5	168.160.000	5	168.687.200	5	172.060.944	5	175.502.300,00	5	179.012.400	5	695.262.844		
	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Pemetan Rawan Pangan (Kabupaten)	Kabupaten Balangan	1		1	70.645.000	1	72.057.900	1	73.499.058	1	74.969.100,00	1	76.468.500	1	296.994.558		
	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Jumlah Pemetan Rawan Pangan (Kabupaten)	Kabupaten Balangan	1		1	70.645.000	1	72.057.900	1	73.499.058	1	74.969.100,00	1	76.468.500	1	296.994.558		
	Demangan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Daerah yang Terdota pada Rawan Pangan (Kabupaten)	Kabupaten Balangan	1		1	97.515.000	1	96.629.300	1	98.561.886	1	100.533.200,00	1	102.543.900	1	398.268.286		
	Kordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota		Kabupaten Balangan																
	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyuliran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Menakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Daerah yang Terdota pada FSA (Kabupaten)	Kabupaten Balangan	1		1	97.515.000	1	96.629.300	1	98.561.886	1	100.533.200,00	1	102.543.900	1	398.268.286		
	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memiliki persyaratan mutu dan keamanan pangan	Kabupaten Balangan	90%	90	22.320.000	90	105.355.000	90	107.569.404	90	109.720.793	90	111.915.300,00	90	114.153.606	90	465.679.103	
	Belaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengawasan keamanan dan mutu pangan segar yang efektif (kali)	Kabupaten Balangan	90	8	24	22.320.000	24	105.355.000	24	107.569.404	24	109.720.793	24	111.915.300,00	24	114.153.606	128	465.679.103
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengujian pangan segar asal tumbuhan (PSAT)	Kabupaten Balangan	60	8	24	22.320.000	24	105.355.000	24	107.569.404	24	109.720.793	24	111.915.300,00	24	114.153.606	128	465.679.103
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TAN KAP	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Kabupaten Balangan	1	0	1	105.000.000	1	110.250.000	1	121.275.000	1	133.402.500	1	146.742.750	5	146.742.750		
	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	Kabupaten Balangan	952,09	0	961,6	105.000.000	971	110.250.000	981	121.275.000	991	133.402.500	1.001	146.742.750	1.000	146.742.750		
	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah data dan informasi sumberdaya ikan (laporan)	Kabupaten Balangan	1	1	1	105.000.000	1	110.250.000	1	121.275.000	1	133.402.500	1	146.742.750	6	146.742.750		
	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Produksi Budidaya Ikan (ton)	Kabupaten Balangan	884,92	10	10	3.468.723.337	10	3.642.159.593	10	4.006.375.454	10	4.407.012.999	10	4.847.714.299	60	25.775.962.692		
	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelembagaan Kelompok Perikanan yang meningkat kelasnya (kelompok)	Kabupaten Balangan	267	11	6	65.250.000	11	172.206.000	11	180.816.300	11	198.897.930	11	218.787.723	11	240.666.496	66	240.666.496
	Pengembangan Kapasitas Pembudi daya Ikan Kecil	Jumlah Penumbuhan kelompok Perikanan (kelompok)	Kabupaten Balangan	50	5	5	17.380.000,00	5	102.553.900,00	5	107.681.585	5	118.449.755	5	130.294.730	5	143.324.204,00	30	143.324.204
	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelenbagan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelembagaan Kelompok Perikanan yang meningkat kelasnya (kelompok)	Kabupaten Balangan	5	5	0	47.860.000,00	5	31.000.000,00	5	32.550.000	5	35.805.000	5	39.385.500	5	43.324.050,00	30	43.324.050
	Pemberian Pendampingan Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah pelatihan yang diselenggarakan (kali)	Kabupaten Balangan	1	1	0,00	0,00	1	38.652.100,00	1	40.584.705	1	44.643.175	1	49.107.493	1	54.018.242,00	6	54.018.242
	Pengelolaan Perbudidaya Ikan	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	Kabupaten Balangan	18	21	18,7	5.338.727.100	18,7	3.296.517.337	18,7	3.461.943.203	18,7	3.807.477.524	18,7	4.188.225.276	18,7	4.607.047.803	95,5	4.607.047.803
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Peningkatan Produksi Budidaya Ikan (kg)	BB	1.338	826	800.000	904.047.100	1.000.000	832.154.000,00	1.200.000	888.761.700,00	1.400.000	1.007.637.870,00	1.500.000	1.138.401.657,00	1.600.000	1.282.241.822,00	1.600.000	1.282.241.822
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan yang diberikan (kelompok)	Kabupaten Balangan	18	17	8	4.392.800.000	8	2.423.170.337,00	8	2.529.328.853	8	2.752.261.739	8	2.997.487.913	8	3.267.236.704	57	3.267.236.704
	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budiyasan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Pemantauan dan Pengendalian Kesehatan Ikan dan Lingkungan (Laporan)	Kabupaten Balangan	4	4	4	41.880.000	4	41.193.000,00	4	43.252.650	4	47.577.915	4	52.335.706	4	57.569.277	24	57.569.277

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DKPPP TAHUN 2021 – 2026

PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Kawasan Perikanan Lestari (Ha)	Kabupaten Balangan	270	4	98.560.900	4	187.016.126,00	4	196.366.933,00	4	216.003.626,00	4	237.603.988,00	4	261.364.387,00	24	261.364.387
<i>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air</i>	Luas Kawasan Perikanan Lestari (Ha)	Kabupaten Balangan	270	28,8	98.560.900	292,03	187.016.126,00	303,71	196.366.933,00	315,86	216.003.626,00	328,50	237.603.988,00	341,64	261.364.387,00	341,64	261.364.387
Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten / Kota	Luas Kawasan Perikanan Lestari Tangkap (Ha)	Kabupaten Balangan	270	28,8	67.190.000	292,03	102.385.000,00	303,71	108.366.933,00	315,86	119.203.626,00	328,50	131.123.988,00	341,64	144.236.387,00	341,64	144.236.387
	Jumlah ikan yang dilepas ke perairan umum (Ekor)	Kabupaten Balangan	31357	11000		150000,00		150000,00		150000,00		150000,00		150000,00		750000,00	
Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten / Kota	Jumlah pengawasan usaha perikanan budidaya yang terawasi (k-ali)	Kabupaten Balangan	18	20	31.370.900	20	84.631.126,00	20	88.000.000,00	20	96.800.000,00	20	106.480.000,00	20	117.128.000,00	120	117.128.000
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Peningkatan Konsumsi Ikan	Kabupaten Balangan	46,44	14	117.802.000	17	231.068.871,00	20,00	242.622.314,00	23,00	266.384.546,00	26,00	293.573.000,00	29,00	322.930.300,00	29	322.930.300,00
<i>Pembiayaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</i>	Angka Konsumsi Ikan	Kabupaten Balangan	46,44	52,9416	94.705.000	54,33	178.068.871,00	55,73	185.972.314,00	57,12	204.569.546,00	58,51	225.026.500,00	59,91	247.529.150,00	59,91	247.529.150,00
Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Pelatihan Pengolahan Hasil Perikanan	Kabupaten Balangan	3	3	94.705.000	8	178.068.871,00	8,00	185.972.314,00	8,00	204.569.546,00	8,00	225.026.500,00	8,00	247.529.150,00	43,00	247.529.150
<i>Penyediaan dan Penyabutan Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota</i>	Jumlah Sarana dan Prasarana Usaha Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan yang diberikan (Paket)	Kabupaten Balangan	1	1	23.087.000	1	53.000.000,00	1,00	56.650.000,00	1,00	62.315.000,00	1,00	68.546.500,00	1,00	75.401.150,00	6,00	75.401.150,00
Permbelian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Usaha Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan yang diberikan (Paket)	Kabupaten Balangan	1	1	23.087.000	1	53.000.000,00	1,00	56.650.000,00	1,00	62.315.000,00	1,00	68.546.500,00	1,00	75.401.150,00	6,00	75.401.150
TOTAL					38.546.877,735		330.19.113,341		34.670.069,009		36.403.572,459		38.471.868,012		40.340.922,275		202.855.659,330

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, bahwa indikator kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang ingin dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Balangan mempunyai tujuan dan sasaran yang selaras dengan tujuan dan sasaran RPJMD, Sehingga indikator kinerja Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Balangan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Balangan dan sasaran pembangunan pertanian mengacu juga pada Fokus pencapaian prioritas Nasional sehingga arah kebijakan bisa selaras dengan program dan kegiatan. Untuk menyelaraskan kebijakan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan disesuaikan Penerapan konsep integrative yang dilaksanakan dengan melibatkan stakeholders terkait pertanian dan perikanan karena :

- a. Stakeholder adalah kelompok organisasi yang memiliki kepentingan dan mendukung dalam program Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan dalam menjalankan kegiatan dan berperan dalam sebagai pengambil keputusan.
- b. Stakeholders adalah sebagai fasilitator yang memfasilitasi dan mencukupi apa yang dibutuhkan dalam menjalankan kegiatan. terutama pada kegiatan Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan khususnya maupun kegiatan lain pada umumnya, agar program dapat berjalan sesuai sasaran dan lebih cepat pencapaiannya. Disarankan agar sumber pendanaan pembangunan melalui teknokratik, aspiratif melalui pokok pikiran dewan dan melalui rencana kerja SKPD hendaknya selaras dengan rencana yang tertuang dalam RPJMD dan Renstra (sector politik) agar rencana lima tahun dapat optimal dicapai.

Konsep yang dilaksanakan pada prioritas pembangunan daerah bidang Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah konsep yang menunjang kegiatan penting dalam program Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yang diupayakan untuk mencapai target dengan mendorong petani meningkatkan produksi melalui berbagai program yang bersifat bantuan, pengawalan, pendampingan yang bersentuhan dengan teknologi pertanian modern.

Selaras dengan Misi ke kedua Visi Misi Bupati bahwa dalam rangka kepastian jumlah luas perkebunan, Tanaman Pangan, Hortikultura tingkat lapangan telah secara kontinyu dilaksanakan perluasan dan rehabilitasi tanaman perkebunan khususnya karet dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas perkebunan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan mengganti / replanting tanaman karet yang sudah tua / rusak dan dilaksanakan pada beberapa wilayah terutama pada wilayah yang siap dan sesuai dengan kriteria lahan yang akan dikembangkan. Namun kendala yang sering ditemui dilapangan adalah karena lahan yang akan dikembangkan sebagian berada pada kawasan hutan yang secara aspek hukum tidak boleh untuk dilakukan kegiatan rehabilitasi kegiatan perkebunan kecuali terlebih dahulu memperoleh ijin.

Konsep integrative terkait dengan SKPD lain adalah merupakan keselarasan dan keterkaitan dalam mendukung program kegiatan sehingga menghasilkan suatu pandangan konsepsi keterpaduan yang sama dan saling bekerja sama dalam mendukung program-program baik dibidang perkebunan, peternakan, perikanan, tanaman pangan dan sarana prasarana dengan tujuan yang sama.

Tercapai tidaknya target pembangunan tidak terlepas dari peran dari sektor lain, seperti Tanaman Pangan dan Prasarana dalam integrasi kegiatan perkebunan Pengembangan Pola Tanam Ganda, selain itu dukungan perencanaan dan alokasi anggaran kegiatan dan alokasi anggaran sebagai *supporting* berupa *sharing* dana yang dikoordinasikan oleh SKPD lain.

Kejelasan dari pelaksana program dan kegiatan juga sangat diharapkan dapat dilihat pada Tabel T-C. 28 Berikut

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DKPPP TAHUN 2021 – 2026

Tabel T-C. 28.

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan (%)	12,14	12,64	12,89	13,14	13,39	13,64	13,89	13,89

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian 2021-2026 diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) setiap tahunnya. Selanjutnya, keberhasilan pencapaian RENSTRA tersebut sangat ditentukan oleh kinerja seluruh jajaran unit kerja lingkup Dinas Pertanian dan stakeholder terkait. Untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan, diperlukan dukungan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan,
Pertanian dan Perikanan
Kabupaten Balangan



RAHMADI, S.Pt. MS
Pembina TK.1 (IV/b)
NIP. 19630908 198711 1 003